

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA TAHUN 2026



BADAN KEUANGAN DAERAH

TAHUN 2025



WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 68);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Payakumbuh.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu kepala Daerah dalam perencanaan pembangunan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan

Daerah untuk periode 4 (empat) tahun.

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah 2026 yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2026 disusun berdasarkan RPD Tahun 2023 -2026.
- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan:
 - a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah bagi seluruh Perangkat Daerah; dan;
 - b. penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta rancangan prioritas dan platfon anggaran sementara.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. bab VI memuat kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - g. bab VII memuat penutup.
- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2026 dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah,

- kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2026; dan/atau
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Perubahan RKPD Tahun 2026 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Wali Kota melalui kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2026;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2026; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2026.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kepala Bappeda menyusun laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2026 setiap 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Bappeda kepada Wali Kota.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 4 Agustus 2025

WALI KOTA PAYAKUMBUH,



ZULMAETA

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 4 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025 NOMOR 9

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	34
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ...	41
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	43
2.5. Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat.....	70
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	72
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	72
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	73
3.3. Program dan Kegiatan.....	75
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	92
BAB V PENUTUP	135
LAMPIRAN	iii

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2025 Kota Payakumbuh.....	8
2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh	39
2.3 Capaian Kinerja Bobot IPKD.....	40
2.4 Capaian Kinerja IPKD Tahun 2018-2023.....	40
2.5 Perbandingan Capaian Kinerja IPKD Tahun 2022 dan Tahun 2023.....	41
2.6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kota Payakumbuh.....	44
2.7 Persandingan Daftar Kegiatan Prioritas Hasil Musrenbang dengan Rancangan Renja PD Tahun 2026.....	70
2.8 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026.....	71
3.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan Sasaran.....	74
3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Kota Payakumbuh.....	77
4.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2026.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat Undang - Undang tersebut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, yang di dalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD.

RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah yang disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045 yang merupakan tahun periode pertama RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045. RKPD Tahun 2026 tidak lagi berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebelumnya tapi telah mengacu kepada Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 yang secara simultan juga sedang disusun serta mengakomodir visi dan misi dari Kepala Daerah Payakumbuh terpilih yang telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2026 merupakan tahun pertama RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029. Sementara itu RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 hanya menjadi dasar dalam penyusunan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang nanti akan diurai capaiannya di Bab II.

Rencana Kerja atau Renja tahun 2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan

penjabaran tahun keempat dari Rencana Strategis Tahun 2023-2026. Namun sesuai dengan penyusunan RKPD Kota Payakumbuh tahun 2026 yang merupakan tahun pertama RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, dokumen Renja BKD Tahun 2026 menjadi penjabaran tahun pertama dari Rencana Strategis BKD Tahun 2025-2029 yang merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan.

Renja OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dari RKPD Kota Payakumbuh dan Renstra OPD ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja OPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD.

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tatacara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja BKD Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- d. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat;
- e. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- i. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Lap. Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemda;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenkuler Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;
- q. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
 - r. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - s. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Payakumbuh (lembaran daerah kota payakumbuh tahun 2010 nomor 2);
 - t. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030;
 - u. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2025- 2045;
 - v. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - w. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025;
 - x. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 tahun 2025 tentang RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2025-2029;
 - y. Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
 - z. Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025;

- aa. Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan dengan maksud untuk memberikan informasi dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan, terkait arah kebijakan, strategi dan langkah-langkah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta kerangka pendanaan dan pengalokasian anggaran yang akan dilakukan pada tahun perencanaan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah tahun 2026 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan program / kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD Kota Payakumbuh dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan potensi yang ada.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024**

BKD melaksanakan pelayanan dibidang pengelolaan keuangan dan aset meliputi pelayanan dalam rangka proses penganggaran daerah, pelayanan dalam mengelola PAD, pelayanan dalam rangka proses pencairan dana belanja baik belanja operasional barang dan jasa maupun belanja modal pemerintah, pelayanan dalam pengelolaan barang milik daerah, serta pelayanan dalam penyusunan pelaporan keuangan daerah bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana kemampuan Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pencapaian target kinerja dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan, berupa indikator dengan target kinerja sebagai instrumen penilaian.

Evaluasi pelaksanaan Renja BKD dan capaian renstra sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH dan
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2025
KOTA PAYAKUMBUH

Perangkat Daerah : BKD

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Renstra pada Renja s.d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)					Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
												Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
								4		5		6		7		8 (7/6)	9		10=(5+7+9)
1						2	3	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	k	Rp	%	Rp	Rp	%
						Urusan wajib Keuangan													
5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-Nilai AKIP oleh Inspektorat IKM BKD -	-A -88,00	46.604.175.293	85	29.313.670.491	-A -87,30	12.314.464.281		10.593.261.379	86	12.658.575.863	52.565.507.733	112,79
5	02	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan dok evaluasi capaian kinerja program/kegiatan	100%	894.452.380	100%	105.653.660	100%	56.774.650	100	50.374.190	89	44.823.400	200.851.250	22,46
5	02	01	2.01	01		Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan PD	2 dokumen	100.398.800		69.134.570	2 dokumen	30.035.300	2 dokumen	26.964.100	90	23.819.800	119.918.470	119,44
5	02	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja PD	4 laporan	42.496.800		36.519.090	4 laporan	26.739.350	4 laporan	23.410.090	88	21.003.600	80.932.780	190,44
5	02	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan PD terhadap aliran kas	95%	34.100.481.264	100%	22.556.292.807	95%	8.244.051.441	100	7.826.651.820	95	9.708.044.573	40.090.989.200	117,57
5	02	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 orang/bulan	31.124.596.988		22.085.750.007	62 orang/bulan	7.869.552.491	62 ASN	7.479.356.560	95	9.294.623.973	38.859.730.540	124,85
5	02	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	1.548.287.600		362.943.140	1 dokumen	321.206.150	1 dokumen	317.093.900	99	386.141.300	1.066.178.340	68,86

5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/se mesteran SKPD	4 laporan	177.010.000		107.599.660	4 laporan	53.292.800	4 laporan	30.201.360	57	27.279.300	165.080.320	93,26
5	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang berkapasitas	100%	918.142.000	100%	184.607.474	90%	113.694.500	100	102.599.040	90	65.000.000	352.206.514	38,36
5	0	0	2.0	0	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	63 stel	138.143.200		76.650.000	-	64.000.000	63 stel	61.425.000	96	65.000.000	203.075.000	147,00
5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	1 dokume n	99.999.600		2.486.880	-	-	-	-	-	-	2.486.880	2,49
5	0	0	2.0	1	Sosialisasi Peraturan PerUndang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	80 orang	299.999.200		56.534.794	-	-	-	-	-	-	56.534.794	18,84
5	0	0	2.0	1	Bimtek Implementasi Peraturan PerUndang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	80 orang	380.000.000		48.935.800	80 orang	49.694.500	80 orang	41.174.040	83	-	90.109.840	23,71
5	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	80%	2.903.115.972	100%	2.317.688.283	80%	1.229.916.500	100	1.145.589.863	93	390.429.500	3.853.707.646	132,74
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 paket	21.497.400		12.603.200	8 paket	5.368.200	8 paket	5.034.000	94	3.630.000	21.267.200	98,93
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	125.652.000		384.363.130	-	-	-	-	-	-	-	0,00
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	41 paket	131.386.360		112.150.400	41 paket	42.745.400	41 paket	33.740.300	79	42.967.600	188.858.300	143,74
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	164.887.040		157.910.680	2 Paket	121.579.000	2 paket	87.316.680	72	28.773.000	274.000.360	166,17

5	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	19.999.440		18.436.000	1 dokumen	6.720.600	1 dokumen	6.720.000	100	1.499.400	26.655.400	133,28
5	0	0	2.0	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	146.040.000		116.118.475	12 laporan	52.962.300	12 laporan	44.258.949	84	53.119.500	213.496.924	146,19
5	0	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30 laporan	3.997.424.000		1.516.106.398	30 laporan	1.000.541.000	30 laporan	968.519.934	97	260.440.000	2.745.066.332	68,67
5	0	0	2.0		Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang tersedia	80%	1.473.770.180		462.917.520	-	741.471.550	100	683.700.000	92	683.700.000	1.830.317.520	124,19
5	0	0	2.0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah unit kendaraan yang disediakan	2 unit	520.000.000			2 unit	630.000.000	2 unit	582.000.000	92	-	582.000.000	0,00
5	0	0	2.0	0	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	12 unit	953.770.180		462.917.520	9 unit	111.471.550	9 unit	101.700.000	91	-	564.617.520	59,20
5	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan perkantoran yang terfasilitasi dengan baik	80%	1.885.300.652	100%	708.864.521	100%	554.370.640	100%	246.494.489	44	259.293.390	1.214.652.400	64,43
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	14.997.600		12.802.000	3 Laporan	11.172.250	3 Laporan	5.651.000	51	6.095.000	24.548.000	163,68
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	972.796.800		696.062.521	4 Laporan	543.198.390	4 Laporan	240.843.489	44	253.198.390	1.190.104.400	122,34
5	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset yang terpelihara	100%	1.307.000.000	100%	859.227.935	100%	365.140.000	100	301.140.988	82	498.240.000	1.658.608.923	126,90
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	156.760.000		87.425.888	1 unit	39.190.000	1 unit	25.784.896	66	39.190.000	152.400.784	97,22

5	0 2	0 1	2.0 9	0 2	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	961.400.000		716.629.851	35 Unit	295.950.000	35 unit	255.157.842	86	439.050.000	1.410.837.693	146,75
5	0 2	0 1	2.0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	59.840.000		55.172.196	5 Unit	30.000.000	5 Unit	20.198.250	67	20.000.000	95.370.446	159,38
5	0 2	0 1	2.1 0		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase fasilitasi pembiayaan yang lancar dari total pembiayaan	100%	4.036.180.000	100%	2.581.335.811	100%	1.009.045.000	100%	920.410.989,00	91	1.009.045.000	4.510.791.800	111,76
5	0 2	0 1	2.1 0	0 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Fasilitasi Pembiayaan)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4.036.180.000		2.581.335.811	1 Unit Kerja	1.009.045.000	1 Unit Kerja	920.410.989	91	1.009.045.000	4.510.791.800	111,76
5	0 2	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-Persentase realisasi belanja thd anggaran; -Lap Keu berbasis akrual; Perda APBD tepat waktu	-95%; -ADA; -27Des	17.197.660.176	-95%; <10%; -ADA	8.973.411.773	-95%; <10%; -ADA	3.666.558.900		2.662.678.003	73	4.698.614.913	16.334.704.689	94,98
5	0 2	0 2	2.0 1		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen penganggaran yang dihasilkan	100%	5.792.288.936	100%	4.198.185.475	100%	1.621.285.650	100	1.445.209.255	89	1.614.778.950	7.258.173.680	125,31
5	0 2	0 2	2.0 1	0 1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	129.483.000		57.240.614	2 dokumen	28.584.200	2 dok	27.321.330	96	28.371.150	112.933.094	87,22
5	0 2	0 2	2.0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	129.483.000		55.683.912	2 dokumen	25.847.700	2 dok	24.405.300	94	29.074.700	109.163.912	84,31
5	0 2	0 2	2.0 1	0 3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 dokumen	69.779.000		54.807.700	1 dokumen	16.669.900	1 dok	15.112.020	91	21.856.300	91.776.020	131,52
5	0 2	0 2	2.0 1	0 4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang Diverifikasi	1 dokumen	91.780.800		22.031.400	1 dokumen	16.868.950	1 dok	15.590.100	92	22.240.150	59.861.650	65,22
5	0 2	0 2	2.0 1	0 5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	31 dokumen	17.863.400		2.470.614.797	31 dokumen	2.911.400	31 dok	2.752.200	95	2.204.500	2.475.571.497	13858,34

5	0	0	2.0	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	31 dokumen	23.943.400	4.792.050	31 dokumen	5.199.000	31 dok	4.804.000	92	5.536.950	15.133.000	63,20
5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	5.120.075.600	1.159.800.505	2 dokumen	1.421.918.000	2 dok	1.271.295.235	89	1.398.034.550	3.829.130.290	74,79
5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	285.877.600	233.369.307	2 dokumen	81.514.500	2 dok	65.508.520	80	80.536.300	379.414.127	132,72
5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 dokumen	172.182.400	139.845.190	3 dokumen	21.772.000	3 dokumen	18.420.550	85	26.924.350	185.190.090	107,55
5	0	0	2.0		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase meningkatnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	100%	3.099.940.342	100%	1.779.927.130	100%	393.914.400	100	80	1.100.582.450	3.195.285.950	103,08
5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	3 dokumen	19.999.920	9.112.720	3 dokumen	5.418.750	3 dok	4.454.000	82	5.932.000	19.498.720	97,49
5	0	0	2.0	0	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	124 dokumen	51.998.640	11.901.010	124 dokumen	13.595.150	124 dok	11.225.500	83	107.407.500	130.534.010	251,03
5	0	0	2.0	0	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	60 dokumen	410.379.200	96.483.950	60 dokumen	101.443.400	60 dok	85.172.100	84	100.052.250	281.708.300	68,65

5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan PFK	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	750 Laporan	99.999.920		22.711.260	750 Laporan	31.857.000	750 Laporan	26.184.190	82	35.050.000	83.945.450	83,95
5	0	0	2.0	0	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	384 dokumen	194.005.680		59.521.160	384 dokumen	55.786.050	384 dok	47.638.000	85	54.342.550	161.501.710	83,25
5	0	0	2.0	1	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 dokumen	99.999.920		160.548.760	2 dokumen	10.479.000	2 dokumen	8.782.500	84	-	169.331.260	169,33
5	0	0	2.0	1	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80 orang	2.099.999.440		1.419.648.270	80 orang	175.335.050	80 org	131.320.080	75	797.798.150	2.348.766.500	111,85
5	0	0	2.0		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya kualitas laporan keuangan PD	100%	4.847.933.917	100%	2.032.259.030	100%	271.900.150	100	241.222.792	89	970.358.200	3.243.840.022	66,91
5	0	0	2.0	0	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 laporan	15.948.720		9.948.350	4 laporan	4.753.200	4 laporan	3.980.490	84	-	13.928.840	87,34

5	0	0	2.0	0	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan - LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	87 dokumen	1.568.864.600	1.103.506.250	87 dokumen	27.040.800	87 dok	23.876.700	88	395.652.600	1.523.035.550	97,08
5	0	0	2.0	0	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	21 laporan	166.012.400	92.066.230	21 laporan	37.514.300	21 lap	36.913.560	98	50.284.000	179.263.790	107,98
5	0	0	2.0	0	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	37 laporan	1.439.653.200	391.327.350	37 laporan	47.259.750	37 lap	44.978.382	95	313.794.250	750.099.982	52,10
5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	217.218.400	155.218.430	2 dokumen	61.077.500	2 dok	55.412.750	91	61.949.000	272.580.180	125,49
5	0	0	2.0	0	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 dokumen	28.328.800	26.850.930	2 dokumen	7.883.300	2 dok	6.743.600	86	5.465.000	39.059.530	137,88
5	0	0	2.0	0	Penyusunan Analisa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen	28.266.600	17.744.995	-	-	-	-	-	4.853.000	22.597.995	79,95
5	0	0	2.0	0	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 dokumen	26.152.800	17.960.170	1 dokumen	7.264.750	1 dok	5.918.170	81	7.160.600	31.038.940	118,68

5	0	0	2.0	0	Pembinaan akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	75 Orang	974.181.400		217.636.325	75 Orang	79.106.550	75 org	63.399.140	80	131.199.750	412.235.215	42,32
5	0	0	2.0		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan urusan kewenangan daerah dan bantuan yang tersalurkan	70%	3.047.970.984	100%	208.190.400	70%	1.227.649.000	100	518.850.784	42	788.556.513	1.515.597.697	49,72
5	0	0	2.0	0	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 laporan	3.047.970.984		208.190.400	1 laporan	1.227.649.000	2 laporan	518.850.784	42	788.556.513	1.515.597.697	49,72
5	0	0	2.0		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan dan implementasi sistem terhadap data keuangan daerah	100%	1.357.496.981	100%	754.849.738	100%	151.809.700	100	142.618.802	94	224.338.800	1.121.807.340	82,64
5	0	0	2.0	0	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	45 dokumen	35.540.000		21.907.790	45 dokumen	10.804.050	45 dok	9.764.800	90	8.042.000	39.714.590	111,75
5	0	0	2.0	0	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1.027.363.600		573.440.098	1 Dokumen	82.899.650	1 dokumen	80.764.200	97	82.874.800	737.079.098	71,74
5	0	0	2.0	0	Pembinaan Sistem Informasi Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	32 orang	299.221.600		159.501.850	32 orang	58.106.000	32 org	52.089.802	90	133.422.000	345.013.652	115,30
5	0	0	2.0		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase PD yang menyediakan laporan aset sesuai dengan peraturan pengelolaan BMD	100%	7.645.386.804	100%	2.845.560.408	90%	970.618.150		808.939.092	83	1.184.873.450	4.839.372.950	63,30
5	0	0	2.0	0	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD dan Aset Kota yang dikelola dengan baik	100%	7.645.386.804	100%	2.845.560.408	100%	970.618.150	100	808.939.092	83	1.184.873.450	4.839.372.950	63,30

5	0	0	2.0	0	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen	319.598.400		180.284.940	1 dokumen	35.356.900	1 dok	23.405.750	66	32.944.150	236.634.840	74,04
5	0	0	2.0	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 dokumen	166.937.000		105.513.430	1 dokumen	46.441.000	1 dok	39.106.950	84	39.919.800	184.540.180	110,54
5	0	0	2.0	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	31 laporan	1.068.111.400		180.602.270	31 laporan	97.434.750	31 laporan	40.122.700	41	294.111.000	514.835.970	48,20
5	0	0	2.0	0	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	31 laporan	156.655.000		82.075.590	31 laporan	39.163.750	31 laporan	37.680.092	96	44.708.400	164.464.082	104,98
5	0	0	2.0	1	Optimalisasi Penggunaan , Pemanfaatan , Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	31 dokumen	2.825.014.920		698.425.555	31 dokumen	677.707.150	31 dok	613.984.900	91	690.395.200	2.002.805.655	70,90
5	0	0	2.0	1	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	31 laporan	314.791.600		1.396.429.423	31 laporan	65.290.000	31 lap	50.338.900	77	74.177.650	1.520.945.973	483,16
5	0	0	2.0	1	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	31 laporan	36.910.600		160.277.400	31 laporan	9.224.600	31 lap	4.299.800	47	8.617.250	173.194.450	469,23
5	0	0	2.0	1	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	31 orang	142.264.400		41.951.800	31 orang	-	-	-		-	41.951.800	29,49
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	13,75%	3.579.089.864	100%	1.829.920.618	100%	870.475.400		653.450.600	75	1.225.163.800	3.708.535.018	103,62
5	0	0	2.0		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah	5%	3.579.089.864	5%	1.829.920.618	5%	870.475.400	100	653.450.600	75	1.225.163.800	3.708.535.018	103,62
5	0	0	2.0	0	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah (UPTD PAJAK DAERAH)	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 dokumen	411.960.000		180.249.505	-	-	-	-		-	180.249.505	43,75

5	0	0	2.0	0	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 laporan	122.952.600	47.606.290	12 laporan	171.975.700	12 laporan	127.963.150	74	72.897.800	248.467.240	202,08
5	0	0	2.0	0	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	10 Unit	502.603.980	312.013.755	10 Unit	76.058.650	10 unit	64.587.180	85	311.070.050	687.670.985	136,82
5	0	0	2.0	0	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 laporan	136.778.600	78.237.722	12 laporan	42.236.900	12 laporan	29.139.840	69	133.171.250	240.548.812	175,87
5	0	0	2.0	0	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 laporan	189.464.280	104.739.680	1 laporan	20.868.500	1 laporan	19.187.920	92	36.566.350	160.493.950	84,71
5	0	0	2.0	0	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Besa Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2 Objek Pajak	463.644.600	81.840.440	2 Objek Pajak	34.970.900	2 OP	6.185.580	18	34.969.750	122.995.770	26,53
5	0	0	2.0	0	Penetapan WPD	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 dokumen	356.501.600	66.156.980	12 dokumen	89.826.900	12 dok	70.133.400	78	71.879.150	208.169.530	58,39
5	0	0	2.0	0	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPTD PAJAK DAERAH)	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 layanan	342.381.720	73.504.400	1 layanan	118.847.950	1 layanan	94.445.270	79	211.720.000	379.669.670	110,89
5	0	0	2.0	1	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 dokumen	366.967.720	283.511.330	1 dokumen	31.741.450	1 dokumen	27.533.590	87	31.741.250	342.786.170	93,41
5	0	0	2.0	1	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 dokumen	316.719.880	218.726.380	12 dokumen	96.106.900	12 dok	46.191.150	48	74.305.800	339.223.330	107,11
5	0	0	2.0	1	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 laporan	333.022.000	194.284.856	1 laporan	91.888.050	1 laporan	81.451.250	89	91.888.200	367.624.306	110,39
5	0	0	2.0	1	Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 laporan	214.694.680	189.049.280	12 laporan	95.953.500	12 laporan	86.632.270	90	154.954.200	430.635.750	200,58

Badan Keuangan Daerah pada tahun anggaran 2024 melalui anggaran murni dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.822.116.731,- realisasi sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp. 15.402.029.074,- atau 86,42% terdiri dari:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Anggaran sebesar Rp. 12.314.464.281,- dan realisasi sebesar Rp. 11.276.961.379,- atau 91,57%
2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Anggaran sebesar Rp. 3.666.558.900,- dan realisasi sebesar Rp. 2.662.678.003,- atau 72,62%
3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Anggaran sebesar Rp. 970.618.150,- dan realisasi sebesar Rp. 808.939.092,- atau 83,34%
4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Anggaran sebesar Rp. 870.475.400,- dan realisasi sebesar Rp. 653.450.600,- atau 75,07%

Urusan keuangan dilaksanakan melalui 4 (empat) program, dimana target kinerja programnya telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator :

- a. Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat. Target kinerja pada tahun 2024 adalah A dengan realisasi BB dan capaian kinerja 89,86%.
- b. Persentase kondisi sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik. Target kinerja pada tahun 2024 adalah 80% dengan realisasi 85% dengan capaian kinerja melebihi 100%.
- c. Persentase realisasi keuangan PD. Target kinerja pada tahun 2024 adalah 90% dan realisasi sebesar 86,42% dengan capaian kinerja 96,02%.
- d. Persentase sasaran program dan kegiatan Renja PD yang selaras dengan renstra PD dan RKPD. Target kinerja pada tahun 2024 adalah 100% dan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota daerah didukung oleh 8 (delapan) kegiatan dan 21 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini berupa Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target 2 dokumen dengan realisasi sebanyak 2 dokumen berupa Renja dan DPA BKD dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.035.300,- terealisasi sebesar Rp. 26.964.200- atau 89,77%;

2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini berupa penyusunan 4 laporan yaitu laporan SAKIP (LkjIP), LKPJ dan LPPD, laporan IKM dan SPIP terealisasi sebanyak 4 laporan dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 26.739.350,- terealisasi sebesar Rp. 23.410.090,- atau 87,55%.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan ini berupa pembayaran gaji dan tunjangan ASN pada Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh sebanyak 62 orang dengan realisasi sebanyak 62 orang dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 7.869.552.491,- terealisasi sebesar Rp. 7.479.356.560,- atau 95,04%;

2) Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN

Sub kegiatan ini berupa pembayaran honorarium pengelola keuangan dan honorarium pejabat pengadaan pada BKD dengan target 1 dokumen dengan realisasi 1 dokumen capaian realisasi kinerja program dan keuangan pelaksanaan tugas ASN dan dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 321.206.150,- terealisasi sebesar Rp. 317.093.900,- atau sebesar 98,72%;

3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Sub kegiatan ini berupa penyusunan dokumen fungsional, LRA, Laporan Keuangan semester 1 dan semester 2 dengan target 4 laporan dengan realisasi 4 laporan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 53.292.800,- terealisasi sebesar Rp. 30.201.360,- atau 56,67%. Rendahnya capaian realisasi keuangan karena efektifitas pelaksanaan rapat yang dikerjakan bersamaan dengan kegiatan lain sehingga efisiensi belanja makan minum rapat.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

1) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

Sub kegiatan ini berupa pengadaan pakaian dinas untuk pegawai Badan Keuangan Daerah dengan target kinerja 62 stel dan terealisasi 62 stel dengan capaian kinerja terealisasi 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 64.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 61.425.000,- atau 99,47%;

2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Sub kegiatan ini berupa pelaksanaan Bimtek SIPD RI dengan target kinerja 80 orang peserta dan terealisasi 80 orang dengan capaian terealisasi 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 49.694.500,- terealisasi sebesar Rp. 41.174.040,- atau 82,85%.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yaitu :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Sub kegiatan ini berupa penyediaan komponen instalasi listrik dengan target 8 paket dan terealisasi sebanyak 8 paket dengan capaian kinerja 100% dan dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 5.368.200,- terealisasi sebesar Rp. 5.034.000,- atau sebesar 93,77%;

2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub kegiatan ini berupa pengadaan logistik kantor sebanyak 41 paket dan terealisasi sebanyak 41 paket dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan

dengan alokasi anggaran Rp. 42.745.400,- terealisasi sebesar Rp. 33.740.300,- atau 78,93%;

3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sub kegiatan ini berupa cetak, fotocopy dan jilid sebanyak 2 paket dan terealisasi sebanyak 2 paket dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 121.579.000,- terealisasi sebesar Rp. 87.316.680,- atau 71,82%;

4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

Sub kegiatan ini berupa penyediaan bahan bacaan sebanyak 1 dokumen media cetak dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 6.796.500,- terealisasi sebesar Rp. 6.720.000,- atau 99,99%;

5) Fasilitas Kunjungan Tamu

Sub kegiatan ini berupa fasilitas kunjungan tamu dengan target 12 laporan dan terealisasi sebanyak 12 laporan dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 52.962.300,- terealisasi sebesar Rp. 44.258.949,- atau 83,57%;

6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini berupa belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah dengan target 30 laporan dan terealisasi sebanyak 30 laporan dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.541.000,- terealisasi sebesar Rp. 968.519.934,- atau 96,80%.

5. Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub kegiatan ini berupa pengadaan kendaraan dinas roda empat dengan target 2 unit dan terealisasi 2 unit dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 630.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 582.000.000,- atau 92,38%;

2) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

Sub kegiatan ini berupa pengadaan laptop dan printer dengan target sebanyak 3 unit dan terealisasi terealisasi 3 unit dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 111.471.550,-

terrealisasi sebesar Rp. 101.700.000,- atau 91,23%.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub kegiatan ini berupa penyediaan materai dan perangko dengan target kinerja 3 laporan dan terealisasi sebanyak 3 laporan dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.172.250,- terealisasi sebesar Rp. 5.651.000,- atau 50,58%. Rendahnya realisasi keuangan karena efisiensi anggaran pembelian materai dan perangko sesuai kebutuhan;

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub kegiatan ini berupa pembayaran rekening telepon dan astinet selama 12 bulan dengan target kinerja 4 laporan dan terealisasi sebanyak 4 laporan dengan capaian kinerja 100%, Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 543.198.390,- terealisasi sebesar Rp. 543.198.390,- atau 44,34%. Rendahnya realisasi keuangan karena belanja internet yang dilaksanakan melalui e-katalog dengan penyedia (PT Telkom) terdapat selisih harga antara penganggaran di DPA dengan satuan standar harga di e-katalog, sehingga terdapat sisa anggaran.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub kegiatan ini berupa belanja pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan eselon 2 (dua) sebanyak 1 unit dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar target keuangan Rp 39.190.000,- terealisasi sebesar Rp. 25.784.896,- atau 65,79%. Rendahnya realisasi keuangan karena efisiensi anggaran, pemeliharaan kendaraan jabatan Kepala BKD sesuai kebutuhan berupa Pembayaran Pajak, BBM dan service ringan berkala;

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub kegiatan ini berupa belanja pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional dengan target kinerja 35 unit kendaraan dinas operasional dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 295.950.000,- terealisasi sebesar Rp. 255.157.842,- atau 86,22%;

3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan ini berupa pemeliharaan 5 unit peralatan dan mesin dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 20.198.250,- atau 67,33%. Rendahnya realisasi keuangan karena efisiensi anggaran dimana pemeliharaan alat kantor, sarana inventaris kantor dilaksanakan sesuai kebutuhan.

8. Peningkatan Pelayanan BLUD dilaksanakan dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

1) Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.

Sub kegiatan ini berupa penyaluran fasilitasi pembiayaan dengan target kinerja sebanyak 1 unit kerja dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.009.045.000,- terealisasi sebesar Rp. 920.410.989,- atau 91,22%.

II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator :

- a. Persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja. Target kinerja pada tahun 2024 adalah 95% dengan realisasi 92,64% dan capaian kinerja 97,51%.
- b. Persentase sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu terhadap APBD dengan target kinerja 10% dengan realisasi 12,47% dan capaian kinerja 80,19%.
- c. Laporan keuangan berbasis akrual dengan target kinerja ada dengan capaian kinerja 100%.

Program Pengelolaan Keuangan Daerah didukung dengan 5 (lima) kegiatan

dan 28 sub kegiatan, yaitu :

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dengan 9 (sembilan) sub kegiatan, yaitu :

1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

Sub kegiatan ini berupa koordinasi penyusunan KUA dan PPAS dengan target 2 dokumen dan terealisasi dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.584.200,- terealisasi sebesar Rp. 27.321.330,- atau 95,58%;

2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Sub kegiatan ini berupa koordinasi penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan target 2 dokumen dan terealisasi dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.847.700,- terealisasi sebesar Rp. 24.405.300,- atau 94,42%;

3) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

Sub kegiatan ini berupa koordinasi penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD dengan target 1 dokumen dan terealisasi dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.669.900,- terealisasi sebesar Rp. 15.112.020,- atau 90,65%;

4) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi perubahan RKA-SKPD

Sub kegiatan ini berupa koordinasi penyusunan dan Verifikasi perubahan RKA-SKPD dengan target 1 dokumen dan terealisasi dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.868.950,- terealisasi sebesar Rp. 15.590.100,- atau 92,42%;

5) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

Sub kegiatan ini berupa koordinasi penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD dengan target 1 dokumen dan terealisasi dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp. 2.911.400,- terealisasi sebesar Rp. 2.752.200,- atau sebesar 94,53%;

6) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi perubahan DPA-SKPD

Sub kegiatan ini berupa koordinasi penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD dengan target 1 dokumen dan terealisasi dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.199.000,- terealisasi

sebesar Rp. 4.804.000,- atau sebesar 92,40%;

- 7) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Sub kegiatan ini berupa koordinasi penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan target kinerja 2 dokumen dan terealisasi dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.421.918.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.271.295.235,- atau 89,1%;

- 8) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Sub kegiatan ini berupa koordinasi penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan target kinerja 2 dokumen dan terealisasi dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 81.514.500,- terealisasi Rp. 65.508.520,- atau 80,36%;

- 9) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

Sub kegiatan ini berupa Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dengan target kinerja 3 dokumen dan terealisasi dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.772.000,- terealisasi sebesar Rp. 18.420.550,- atau 84,61%.

2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu :

- 1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Sub kegiatan ini berupa pelaksanaan koordinasi pengelolaan kas daerah dengan target 3 dokumen dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.418.750,- terealisasi sebesar Rp. 4.454.000,- atau 82,20%;

- 2) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

Sub kegiatan ini berupa penerbitan 124 dokumen dan terealisasi dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.595.150,- terealisasi Rp. 11.225.500,- atau 82,57%;

- 3) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
Sub kegiatan ini berupa Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya, dengan target 60 dokumen dan terealisasi dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 101.443.400,- terealisasi Rp. 85.172.100,- atau 83,96%;
- 4) Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)
Sub kegiatan ini dilaksanakan dengan target kinerja 750 dan terealisasi dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.857.000,- terealisasi Rp. 26.184.190,- atau 82,19%;
- 5) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
Sub kegiatan ini dilaksanakan dengan target kinerja 384 dokumen dan terealisasi dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 55.786.050,- terealisasi Rp. 47.638.000,- atau 85,39%;
- 6) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
Sub kegiatan ini berupa Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban dengan target kinerja 2 dokumen dan terealisasi dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.479.000,- terealisasi Rp. 8.782.500,- atau 83,81%;
- 7) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Sub kegiatan ini berupa Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 80 orang dan terealisasi dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 175.335.050,- terealisasi Rp. 131.320.080,- atau 74,90%.

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu :

- 1) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

Sub kegiatan ini berupa penyusunan dokumen pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah dengan target 4 dokumen dan terealisasi dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.753.200,- terealisasi sebesar Rp. 3.980.490,- atau 83,74%.

- 2) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban;

Sub kegiatan ini dengan target kinerja jumlah berita acara rekonsiliasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan pendapatan Lo dan beban semesteran dan tahunan sebanyak 87 dokumen dan terealisasi dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.040.800,- terealisasi sebesar Rp. 23.876.700,- atau 88,30%;

- 3) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

Sub kegiatan ini dengan target kinerja jumlah laporan keuangan triwulan, semesteran dan tahunan, jumlah laporan e-audit sebanyak 21 laporan dan terealisasi dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.514.300,- terealisasi sebesar Rp. 36.913.560,- atau 98,40%;

- 4) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan ini berupa penyusunan laporan LKPJ dengan target kinerja sebanyak 37 laporan dan terealisasi dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 47.259.750,- terealisasi sebesar Rp. 44.978.382,- atau 95,17%;

- 5) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini berupa penyusunan Perda dan Perwako Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan target 2 dokumen dan

teralisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 61.077.500,- terealisasi sebesar Rp. 55.412.750,- atau 90,73%;

- 6) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

Sub kegiatan ini berupa penyusunan dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah dengan target kinerja 2 dokumen dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.883.300,- terealisasi sebesar Rp. 6.743.600,- atau 85,54%;

- 7) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah

Sub kegiatan ini berupa penyusunan dokumen kebijakan dan panduan teknis penyelenggaraan akuntansi daerah sebanyak 1 dokumen dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.264.750,- terealisasi sebesar Rp. 5.918.170,- atau 81,46%;

- 8) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini berupa Bimtek Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 75 orang peserta dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 79.106.550,- terealisasi sebesar Rp. 63.399.140,- atau 80,14%.

4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak,

Sub kegiatan ini berupa pengelolaan dana darurat dan mendesak dengan target 1 laporan dan terealisasi sebanyak 1 laporan dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.227.649.000,- terealisasi sebesar Rp. 518.850.784,- atau 42,26%,-. Rendahnya realisasi keuangan karena disesuaikan dengan keadaan darurat dan keperluan

mendesak seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang memenuhi syarat untuk dibiayai dengan dana BTT.

5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

1) Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah

Sub kegiatan ini berupa inventarisasi data / laporan yang dikirimkan untuk pemerintah pusat dan propinsi dengan target kinerja 45 dokumen dan terealisasi dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.804.050,- terealisasi sebesar Rp. 9.764.800,- atau 90,38%;

2) Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

Sub kegiatan ini berupa Implementasi dan Pemeliharaan aplikasi Bidang Keuangan Daerah dengan target kinerja 1 dokumen hasil implementasi dan pemeliharaan bidang keuangan daerah dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 82.899.650,- terealisasi sebesar Rp. 80.764.200,- atau 97,42%;

3) Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini berupa Pembinaan SKPD dalam pemanfaatan aplikasi Bidang Keuangan Daerah dengan target kinerja 32 orang dan terealisasi dengan kinerja capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 58.106.000,- terealisasi sebesar Rp. 52.089.802,- atau 89,65%.

III. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator Persentase PD dengan laporan aset sesuai dengan Peraturan Pengelolaan BMD dengan target kinerja 90,32% dan terealisasi 100% atau dengan capaian kinerja 110,72%.

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah didukung dengan 1 (satu) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan yaitu :

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu :

1) Penyusunan Standar Satuan Harga

Sub kegiatan ini berupa penyusunan standar harga satuan dengan target kinerja 1 dokumen dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.356.900,- terealisasi sebesar Rp. 23.405.750,- atau 66,20%. Rendahnya realisasi keuangan karena efisiensi belanja makan minum rapat dan honor tim pelaksanaan penyusunan Standar Satuan Harga (SSH);

2) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Sub kegiatan ini berupa penyusunan dokumen RKPMD dengan target kinerja 2 dokumen dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.441.000,- terealisasi sebesar Rp. 39.106.950,- atau 84,21%;

3) Penatausahaan Barang Milik Daerah

Sub kegiatan ini berupa pendampingan penatausahaan barang milik daerah oleh SKPD dengan target kinerja 31 laporan dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar 97.434.750,- terealisasi sebesar Rp. 40.122.700,- atau 41,18%. Rendahnya keuangan karena efisiensi honorarium narasumber dan makan minum rapat pendampingan penatausahaan BMD karena akan menggunakan aplikasi E-BMD;

4) Penilaian Barang Milik Daerah

Sub kegiatan ini berupa penilaian terhadap laporan BMD SKPD dengan target kinerja 31 laporan dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.163.750,- terealisasi sebesar Rp. 37.680.092,- atau 96,21%;

5) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Sub kegiatan ini berupa pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan SKPD dengan target kinerja 31 dokumen dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 677.707.150,-

terrealisasi sebesar Rp. 613.984.900,- atau 90,60%;

6) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Sub kegiatan ini berupa pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan SKPD dengan target kinerja 31 SKPD dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.290.000,- terealisasi sebesar Rp. 50.338.900,- atau 77,10%;

7) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Sub kegiatan ini berupa pendampingan penyusunan laporan BMD SKPD dengan target kinerja 31 laporan dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.224.600,- terealisasi sebesar Rp. 4.299.800,- atau 46,61%. Rendahnya realisasi keuangan karena efisiensi belanja makan minum rapat karena pelaksanaan pendampingan penyusunan laporan BMD SKPD dilaksanakan bersamaan dengan rekonsiliasi laporan BMD SKPD;

8) Pembinaan Pengelolaan BMD Pemerintah Kab/Kota

Sub kegiatan ini berupa pendampingan pengelolaan BMD SKPD dengan target kinerja 31 laporan dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.566.100,- terealisasi sebesar Rp. 26.135.200,- atau 73,48%.

IV. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator persentase realisasi PAD dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 106,51%.

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah didukung dengan 1 (satu) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah terdiri dari 11 (sebelas) sub kegiatan, yaitu :

1) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Sub kegiatan ini berupa Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dengan target 12 laporan hasil penyuluhan dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 171.975.700,- terealisasi sebesar Rp. 127.963.150,- atau 74,41%;

2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

Sub kegiatan ini berupa Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah dengan target 10 unit dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 76.058.650,- terealisasi sebesar Rp. 64.587.180,- atau 84,92%;

3) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sub kegiatan ini berupa Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah dengan target 12 laporan dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 42.236.900,- terealisasi sebesar Rp. 29.139.840,- atau 68,99%. Rendahnya realisasi keuangan karena Pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak belum dapat terlaksana sepenuhnya karena dasar hukum pelaksanaan pendataan dan penomoran NOPD berupa Perwako terkait Juknis Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum ditetapkan, masih dalam proses fasilitasi provinsi dan persetujuan Kemendagri;

4) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Sub kegiatan ini berupa Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dengan target 1 laporan dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.868.500,- terealisasi sebesar Rp. 19.187.920,- atau 91,95%;

5) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Sub kegiatan ini berupa Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan target 2 objek pajak dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.970.900,- terealisasi sebesar Rp. 6.185.580,- atau 17,69%. Rendahnya realisasi keuangan karena Pelaksanaan penilaian massal NJOP PBB berdasarkan data transaksi BPHTB dan data NJOP bersama BPN melalui data yang saling terintegrasi belum dapat terlaksana karena harus menyesuaikan Sistem Informasi masing-masing terlebih dahulu sebagai dampak keluarnya SE Menteri Kominfo No 4 tahun 2024 tentang

Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Untuk Mendukung Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan SPBE dimana Kementerian dan Pemerintah Daerah harus menyesuaikan kembali Spesifikasi Integrasi Data sesuai yang diberikan oleh Kementerian Kominfo;

6) Penetapan wajib pajak daerah

Sub kegiatan ini berupa penetapan wajib pajak daerah dengan target kinerja 12 dokumen dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 89.826.900,- terealisasi sebesar Rp. 70.133.400,- atau 78,08%;

7) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Sub kegiatan ini berupa Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan target 1 layanan dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 118.847.950,- terealisasi sebesar Rp. 94.445.270,- atau 79,47%;

8) Penagihan Pajak Daerah

Sub kegiatan ini berupa penagihan objek pajak daerah dengan target 1 dokumen dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.741.450,- terealisasi sebesar Rp. 27.533.590,- atau 86,74%;

9) Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah

Sub kegiatan ini berupa pelaksanaan Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah dengan target 12 dokumen hasil Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah dan terealisasi dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 96.106.900,- terealisasi sebesar Rp. 46.191.150,- atau 48,06%. Rendahnya realisasi keuangan karena Efisiensi honorarium narasumber tenaga ahli dari Kemendagri untuk penyusunan Ranperwako tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No 1 Tahun 2024 PDRD;

10) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah

Sub kegiatan ini berupa pengelolaan retribusi daerah dengan target 1 dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah dan terealisasi dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 91.888.050,-

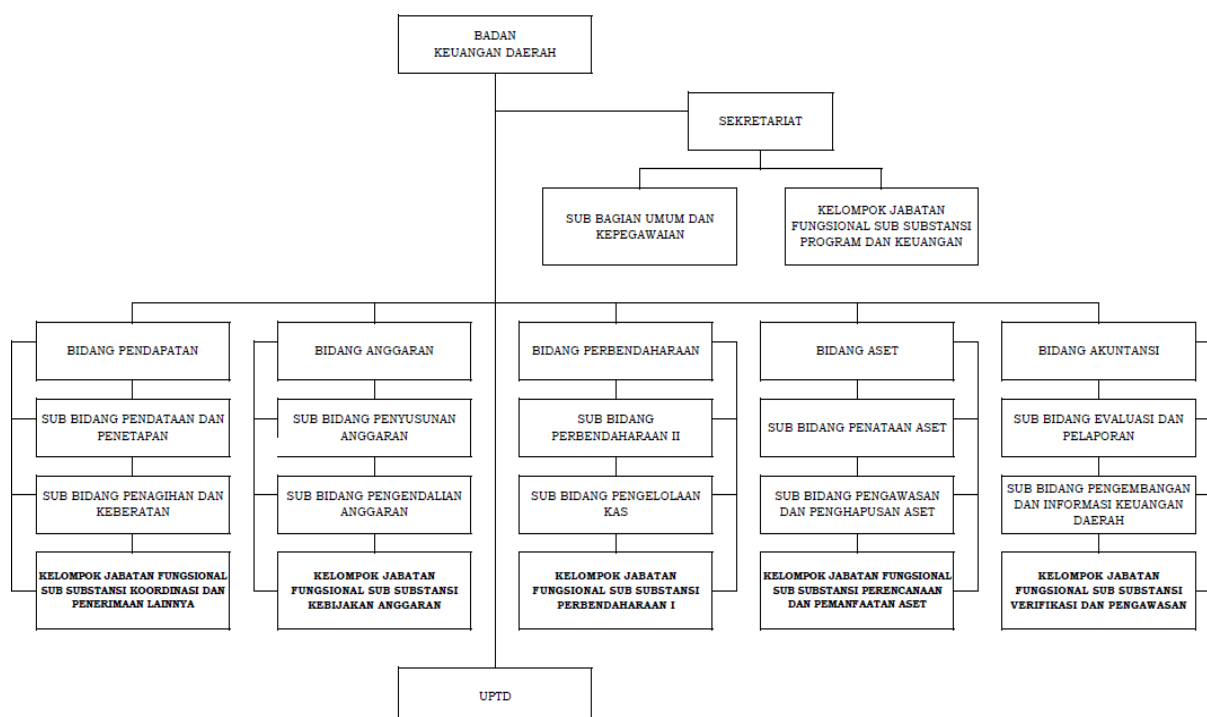
teralisasi sebesar Rp. 81.451.250,- atau 88,64%;

11) Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah

Sub kegiatan ini berupa pelaksanaan Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dengan target 12 laporan dan teralisasi dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 95.953.500,- teralisasi sebesar Rp. 86,632,270,- atau 90,29%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 4 menyatakan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah serta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 5 menyatakan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, maka Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :



Secara umum, tugas BKD adalah membantu Walikota dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah dan menyelenggarakan pengelolaan aset daerah. BKD Kota Payakumbuh mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan penunjang urusan pemerintah dalam bidang keuangan dan bantuan yang diberikan kepada kota. Secara struktural tugas dan fungsi masing-masing dapat diuraikan seperti dibawah ini :

Kepala Badan

Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Keuangan Daerah. Kepala Badan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan Pemerintah bidang keuangan daerah
2. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintah bidang keuangan daerah
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang keuangan daerah
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi

Sekretaris

Mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Badan, penyelenggaraan administratif umum, surat menyurat, kepegawaian, pengelolaan keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan dan ketatalaksanaan Badan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan. Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
2. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian,

- keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
4. Pengorganisasian urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
 5. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Badan
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsi

Kepala Bidang Pendapatan Daerah

Bidang pendapatan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan. Bidang pendapatan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang pendapatan
2. Penyelenggaraan kegiatan bidang pendapatan
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pendapatan
4. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang pendapatan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi

Kepala Bidang Anggaran

Bidang anggaran mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang anggaran. Bidang anggaran mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang anggaran
2. Penyelenggaraan kegiatan bidang anggaran
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang anggaran
4. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang anggaran
5. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi

Kepala Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang perbendaharaan. Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Perbendaharaan
2. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Perbendaharaan
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perbendaharaan
4. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perbendaharaan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi

Kepala Bidang Aset

Bidang aset mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang aset. Bidang aset mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional bidang aset
2. Penyelenggaraan kegiatan bidang aset
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang aset
4. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang aset
5. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi

Kepala Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang akuntansi. Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang akuntansi
2. Penyelenggaraan kegiatan bidang akuntansi
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang akuntansi
4. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang akuntansi
5. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya BKD saat ini terdapat 62 (enam puluh dua) personil PNS. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, BKD didukung dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- b. Fungsional Perencana / Sub Koordinasi Program dan Keuangan
- 3. Bidang Pendapatan, terdiri dari
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan
 - b. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan
 - c. AKPD Penyetaraan / Sub Bidang Koordinasi Penerimaan Lainnya
- 4. Bidang Anggaran, terdiri dari
 - a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran
 - b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran
 - c. AKPD Penyetaraan / Sub Bidang Koordinasi Kebijakan Anggaran
- 5. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari
 - a. Sub Bidang Pengelolaan Kas
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan II
 - c. AKPD Penyetaraan / Sub Bidang Koordinasi Perbendaharaan I
- 6. Bidang Aset, terdiri dari
 - a. Sub Bidang Pengawasan dan Penghapusan Aset
 - b. Sub Bidang Penataan Aset
 - c. AKPD Penyetaraan / Sub Bidang Koordinasi Perencanaan dan Pemanfaatan Aset
- 7. Bidang Akuntansi, terdiri dari
 - a. Sub Bidang Pengembangan dan IKD
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
 - c. AKPD Penyetaraan / Sub Bidang Koordinasi Verifikasi dan Pengawasan
- 8. UPTD Pajak Daerah, terdiri dari
 - a. Kepala TU UPTD Pajak Daerah
- 9. UPTD Fasilitasi Pembiayaan, terdiri dari
 - a. Kepala TU UPTD Fasilitasi Pembiayaan

Indikator kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dari 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) indikator yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 serta 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

TABEL 2.2.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Penetapan Perda APBD	-	-	20 Des	20 Des	20 Des	20 Des	18-Dec	27-Dec	20 Des	20 Des	
3	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	-	12%	12%	12%	12%	16,62%	16,59%	12%	12%	
4	Nilai AKIP BKD oleh Inspektorat	-	-	A	A	A	A	B	BB	A	A	
5	Skor Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	-	-	75,000	76,000	78,000	79,000	77,432	71,756	78,000	79,000	

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), bahwa untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah maka perlu dilakukan pengukuran IPKD. Oleh karena itu kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah disajikan sesuai IPKD, adapun gambaran nilai indeks pengelolaan keuangan daerah untuk Kota Payakumbuh yang bersumber dari aplikasi Kementrian Dalam Negeri serta didukung dengan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 900.1.15.3/6145/BSKDN perihal penyampaian SK Mendagri tentang Hasil IPKD Tahun Anggaran 2023 Tahun Ukur 2024 Kota Payakumbuh mendapatkan skor 71,756 dengan nilai B atau kategori “Perlu Perbaikan” dimana berada pada kemampuan keuangan rendah. Hal ini jauh menurun apabila disbanding dengan nilai IPKD tahun 2022, tahun ukur 2023 yaitu kategori 77,433 nilai A dengan kategori Baik. Nilai Indeks/Skor IPKD tersebut diukur melalui 6 dimensi yang meliputi :

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;
3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah;
4. Penyerapan anggaran;

5. Kondisi keuangan daerah;

6. Opini BPK atas LKPD.

Skor IPKD Tahun 2024 dijabarkan ke dalam tabel berikut ini :

TABEL 2.3.
Capaian Kinerja Bobot IPKD

No	Dimensi IPKD	Bobot	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
1	Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	15	11,000	9,586	87,15
2	Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	20	20,000	15,000	75,00
3	Transparansi pengelolaan keuangan daerah	15	10,000	13,448	134,48
4	Penyerapan anggaran	20	18,000	13,333	74,07
5	Kondisi keuangan daerah	15	2,000	5,388	269,40
6	Opini BPK atas LKPD	15	15,000	15,000	100,00
	INDEKS TOTAL	100	76,000	71,756	94,4

Kemudian perbandingan capaian skor IPKD yang diraih dari tahun ke tahun dapat diurai sebagai berikut :

TABEL 2.4.
Capaian Kinerja IPKD Tahun 2018-2023

No	Capaian Kinerja Tahun Ke	Skor IPKD	Kategori	Nilai	Ket (KKD)	Ket
1	2023	71,7560	Perlu Perbaikan	B	Klaster Rendah	Tahun Ukur 2024
2	2022	77,4330	Baik	A	Klaster Rendah	Tahun Ukur 2023
3	2021	71,8861	Perlu Perbaikan	B	Klaster Rendah	Tahun Ukur 2022
4	2020	73,4064	Baik	A	Klaster Sedang	Tahun Ukur 2021
5	2019	52,7397	Perlu Perbaikan	C	Klaster Rendah	Tahun Ukur 2020
6	2018	51,3221	Perlu Perbaikan	C	Klaster Rendah	Tahun Ukur 2019

Penurunan capaian kinerja tahun 2023 yang diukur pada tahun 2024 ada pada penurunan skor 3 dimensi pertama yaitu dimensi kesesuaian dokumen

perencanaan dan penganggaran, dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, dan dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah dan tergambar pada tabel berikut :

TABEL 2.5.
Perbandingan Capaian Kinerja IPKD
Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Dimensi IPKD	Bobot	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2022	Ket
1	Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	15	9,586	11,395	
2	Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	20	15,000	20,000	
3	Transparansi pengelolaan keuangan daerah	15	13,448	15,000	
4	Penyerapan anggaran	20	13,333	13,333	
5	Kondisi keuangan daerah	15	5,388	2,704	
6	Opini BPK atas LKPD	15	15,000	15,000	
	INDEKS TOTAL	100	71,756	77,433	

Meskipun terjadi penurunan pada 3 dimensi diatas, namun ada kenaikan pada capaian kinerja dimensi kelima yaitu kondisi keuangan daerah.

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Regulasi Pemerintah yang Sering Berubah

Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang relative sering berubah- ubah antara lain pedoman pengelolaan keuangan daerah yang sudah beberapa kali di rubah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578). Kemudian disusul dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenkuler Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka peraturan ini mencakup pengaturan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Selanjutnya berdasarkan prinsip, asas dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien dan transparan.

2. Penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pada saat ini, pengukuran kinerja menjadi aspek penting dalam melihat keberhasilan perangkat daerah dalam mewujudkan visi misi daerah, ini menjadi tantangan bagi Badan Keuangan Daerah dalam merumuskan rencana strategis yang diselaraskan dengan rencana daerah. Kemudian menjadi rencana kerja dan rencana aksi disetiap tahun anggaran. Yang mana capaian kinerja dan output menjadi pengukur keberhasilan dalam pencapaian target yang ada sehingga selaras dengan tujuan dan sasaran BKD sendiri dalam mencapai akuntabilitas kinerja.

3. Penggunaan Aplikasi Kemendagri SIPD RI Penatausahaan dan Pelaporan Akuntansi, Pemanfaatan aplikasi pelaporan P3DN, Penggunaan Aplikasi E-Katalog Versi 6, dan Penggunaan Aplikasi Coretax

Sejalan dengan tujuan dan sasaran yang terdapat pada RPJMN dan RPJMD bahwa untuk meningkatnya kualitas tata kelola keuangan, tata kelola aset dan tata kelola pendapatan, maka diharapkan dapat memaksimalkan penerapan sistem informasi digitalisasi pada informasi

keuangan yang dimulai dari proses perencanaan penganggaran penatausahaan hingga pelaporan akuntansi.

Berdasarkan tantangan dan beberapa kondisi diatas maka solusi yang dilakukan adalah :

- a. Menyikapi perubahan Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah adalah dengan menetapkan kebijakan daerah yaitu perubahan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan dengan memaduserasikan peraturan pengelolaan keuangan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan pengukuran kinerja;
- c. Menyikapi penggunaan SIPD RI, dan beberapa aplikasi yang masih membutuhkan penyesuaian dan maintenance terhadap fitur dan menu yang tersedia, BKD diminta tanggap dan sesegeranya melakukan adaptasi terhadap aplikasi tersebut.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Badan Keuangan Daerah.

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2026 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 2.6 sebagai berikut :

TABEL 2.6
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
KOTA PAYAKUMBUH

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/SubKeg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/SubKeg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BKD	-Nilai AKIP oleh Inspektorat - Nilai IKM	A; 88	12.681.045.963	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BKD	-Nilai AKIP oleh Inspektorat - Nilai IKM	A; 88	12.681.045.963	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	BKD	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan	100%	43.838.500	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	BKD	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan	100%	43.838.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	BKD	jumlah dokumen perencanaan PD	2 dokumen	22.834.900	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	BKD	jumlah dokumen perencanaan PD	2 dokumen	22.834.900	
	Evaluasi Kinerja PD	BKD	jumlah laporan evaluasi kinerja PD	4 laporan	21.003.600	Evaluasi Kinerja PD	BKD	jumlah laporan evaluasi kinerja PD	4 laporan	21.003.600	

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKD	Persentase realisasi keuangan PD terhadap aliran kas	95%	9.708.044.573	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKD	Persentase realisasi keuangan PD terhadap aliran kas	95%	9.708.044.573	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 orang/bulan	9.294.623.973	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 orang/bulan	9.294.623.973	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BKD	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	386.141.300	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BKD	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	386.141.300	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BKD	Jumlah laporan keuangan dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	4 laporan	27.279.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BKD	Jumlah laporan keuangan dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	4 laporan	27.279.300	
3	Administrasi Kepegawaian PD	BKD	Persentase ASN yang berkapasitas	100%	265.000.000	Administrasi Kepegawaian PD	BKD	Persentase ASN yang berkapasitas	100%	265.000.000	

	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	BKD	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	65 paket	65.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	BKD	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	65 paket	65.000.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	-	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	-	-	
	Sosialisasi Peraturan PerUndang-Undangan	BKD	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 orang	100.000.000	Sosialisasi Peraturan PerUndang-Undangan	BKD	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 orang	100.000.000	
	Bimtek Implementasi Peraturan PerUndang-Undangan	BKD	Jumlah orang yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	100 orang	100.000.000	Bimtek Implementasi Peraturan PerUndang-Undangan	BKD	Jumlah orang yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	100 orang	100.000.000	
4	Administrasi Umum PD	BKD	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	80%	652.809.500	Administrasi Umum PD	BKD	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	80%	652.809.500	

	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	BKD	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 paket	3.630.000	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	BKD	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 paket	3.630.000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BKD	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BKD	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	
	Penyediaan bahan logistik kantor	BKD	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	41 paket	42.967.600	Penyediaan bahan logistik kantor	BKD	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	41 paket	42.967.600	
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	BKD	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	28.773.000	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	BKD	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	28.773.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BKD	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	1.499.400	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BKD	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	1.499.400	

	Fasilitasi kunjungan tamu	BKD	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	53.119.500	Fasilitasi kunjungan tamu	BKD	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	53.119.500	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BKD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30 laporan	522.820.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BKD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30 laporan	522.820.000	
5	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKD	Jumlah unit yang tersedia	8 unit	150.000.000	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKD	Jumlah unit yang tersedia	8 unit	150.000.000	
	Pengadaan Mebel	BKD	Jumlah paket mebel yang disediakan	4 unit/paket	75.000.000	Pengadaan Mebel	BKD	Jumlah paket mebel yang disediakan	4 unit/paket	75.000.000	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	BKD	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	75.000.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	BKD	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	75.000.000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKD	Persentase layanan perkantoran yang terfasilitasi dengan baik	80%	259.293.390	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKD	Persentase layanan perkantoran yang terfasilitasi dengan baik	80%	259.293.390	

	Penyediaan jasa surat menyurat	BKD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	6.095.000	Penyediaan jasa surat menyurat	BKD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	6.095.000	
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	BKD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	253.198.390	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	BKD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	253.198.390	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKD	Persentase Aset yang terpelihara	100%	502.060.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKD	Persentase Aset yang terpelihara	100%	502.060.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	BKD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	42.950.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	BKD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	42.950.000	

	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	BKD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	439.110.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	BKD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	439.110.000	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	BKD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	20.000.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	BKD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	20.000.000	
8	Peningkatan Pelayanan BLUD	BKD	Persentase fasilitas pembiayaan yang lancar dari total pembiayaan	100%	1.100.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	BKD	Persentase fasilitas pembiayaan yang lancar dari total pembiayaan	100%	1.100.000.000	
	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.100.000.000	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	BKD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.100.000.000	

II	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKD	-Persentase realisasi belanja thd anggaran; -Lap Keu berbasis akrual - Perda APBD tepat waktu	-95%; -ADA; -27 Des	4.088.250.813	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKD	-Persentase realisasi belanja thd anggaran; -Lap Keu berbasis akrual - Perda APBD tepat waktu	-95%; -ADA; -27 Des	4.088.250.813	
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BKD	Persentase dokumen penganggaran yang dihasilkan	100%	1.616.157.800	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BKD	Persentase dokumen penganggaran yang dihasilkan	100%	1.616.157.800	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BKD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	28.371.150	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BKD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	28.371.150	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BKD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	29.074.700	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BKD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	29.074.700	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BKD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 dokumen	21.856.300	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BKD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 dokumen	21.856.300	

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BKD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang Diverifikasi	1 dokumen	22.240.150	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BKD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang Diverifikasi	1 dokumen	22.240.150	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BKD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	31 dokumen	3.583.350	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BKD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	31 dokumen	3.583.350	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BKD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	31 dokumen	5.536.950	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BKD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	31 dokumen	5.536.950	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BKD	Jumlah Perda APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	1.398.034.550	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BKD	Jumlah Perda APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	1.398.034.550	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BKD	Jumlah Perda Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	80.536.300	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BKD	Jumlah Perda Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	80.536.300	

	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BKD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 dokumen	26.924.350	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BKD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 dokumen	26.924.350	
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BKD	Persentase meningkatnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	100%	1.136.953.525	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BKD	Persentase meningkatnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	100%	1.136.953.525	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	3 dokumen	6.525.200	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	3 dokumen	6.525.200	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	124 dokumen	118.148.250	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	124 dokumen	118.148.250	

	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	60 dokumen	110.057.475	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	60 dokumen	110.057.475	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan PFK	BKD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	750 Laporan	38.555.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan PFK	BKD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	750 Laporan	38.555.000	

	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	384 dokumen	54.342.550	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	384 dokumen	54.342.550	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BKD	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 dokumen	11.526.900	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BKD	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 dokumen	11.526.900	

	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BKD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80 orang	797.798.150	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BKD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80 orang	797.798.150	
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BKD	Persentase meningkatnya kualitas laporan keuangan PD	100%	1.097.702.095	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BKD	Persentase meningkatnya kualitas laporan keuangan PD	100%	1.097.702.095	
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran kas Daerah	BKD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 laporan	5.307.016	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran kas Daerah	BKD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 laporan	5.307.016	

	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan - LO dan Beban	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan - LO, dan Beban	87 dokumen	390.203.750	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan - LO dan Beban	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan - LO, dan Beban	87 dokumen	390.203.750	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BKD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	21 laporan	55.240.866	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BKD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	21 laporan	55.240.866	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BKD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	37 laporan	316.874.250	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BKD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	37 laporan	316.874.250	

	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BKD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	72.279.715	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BKD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	72.279.715	
--	---	-----	--	-----------	------------	---	-----	--	-----------	------------	--

	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 dokumen	31.396.054	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 dokumen	31.396.054	
	Penyusunan Analisa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen	9.405.897	Penyusunan Analisa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen	9.405.897	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara Akuntansi Pemerintah Daerah	BKD	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 dokumen	8.702.397	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara Akuntansi Pemerintah Daerah	BKD	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 dokumen	8.702.397	

	Pembinaan akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BKD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	72 Orang	208.292.150	Pembinaan akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BKD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	75 Orang	208.292.150	
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BKD	Persentase pengelolaan urusan kewenangan daerah dan bantuan yang tersalurkan	70%	43.170.085	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BKD	Persentase pengelolaan urusan kewenangan daerah dan bantuan yang tersalurkan	70%	43.170.085	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BKD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-	-	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BKD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-	-	

	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BKD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 laporan	43.170.085	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BKD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 laporan	43.170.085	
5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	BKD	Persentase pengelolaan dan implementasi sistem terhadap data keuangan daerah	100%	194.267.308	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	BKD	Persentase pengelolaan dan implementasi sistem terhadap data keuangan daerah	100%	194.267.308	
	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	45 dokumen	11.826.254	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	45 dokumen	11.826.254	

	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	4 Dokumen	82.874.800	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	4 Dokumen	82.874.800	
	Pembinaan Sistem informasi Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	BKD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	32 orang	99.566.254	Pembinaan Sistem informasi Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	BKD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	32 orang	99.566.254	
III	PROGRAM PENGELOLAAN BMD	BKD	Persentase PD yang menyediakan laporan aset sesuai dengan peraturan pengelolaan BMD	100,00%	1.547.624.650	PROGRAM PENGELOLAAN BMD	BKD	Persentase PD yang menyediakan laporan aset sesuai dengan peraturan pengelolaan BMD	100%	1.547.624.650	

1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKD	Persentase BMD dan Aset Kota yang terkelola dengan baik	100%	1.547.624.650	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKD	Persentase BMD dan Aset Kota yang terkelola dengan baik	100%	1.547.624.650	
	Penyusunan Standar Harga	BKD	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen	58.444.150	Penyusunan Standar Harga	BKD	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen	58.444.150	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BKD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 dokumen	41.740.500	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BKD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 dokumen	41.740.500	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BKD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	31 laporan	320.871.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BKD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	31 laporan	320.871.000	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BKD	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi LHI BMD	31 laporan	300.000.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BKD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	31 laporan	300.000.000	

	Pengamanan Barang Milik Daerah	BKD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan BMD	-	-	Pengamanan Barang Milik Daerah	BKD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan BMD	-	-	
	Penilaian Barang Milik Daerah	BKD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 laporan	44.997.300	Penilaian Barang Milik Daerah	BKD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 laporan	44.997.300	
	Optimalisasi Penggunaan , Pemanfaatan , Pemindahtanganan,Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	31 dokumen	693.891.200	Optimalisasi Penggunaan , Pemanfaatan , Pemindahtanganan,Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	31 dokumen	693.891.200	

	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BKD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	31 laporan	78.457.500	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BKD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	31 laporan	78.457.500	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BKD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	31 laporan	9.223.000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BKD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	31 laporan	9.223.000	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	BKD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	BKD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BKD	Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	13,75%	1.392.457.000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BKD	Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	13,75%	1.392.457.000	

1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BKD	Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah	5%	1.392.457.000	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BKD	Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah	5%	1.392.457.000	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		-	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		-	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BKD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 laporan	156.278.250	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BKD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 laporan	156.278.250	
	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	BKD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	25 Unit	311.070.050	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	BKD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	10 Unit	311.070.050	

	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BKD	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 laporan	141.516.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BKD	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 laporan	141.516.000	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BKD	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 laporan	36.566.350	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BKD	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 laporan	36.566.350	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBBP2) serta Besa Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BKD	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2 Objek Pajak	34.969.750	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBBP2) serta Besa Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BKD	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2 Objek Pajak	34.969.750	
	Penetapan WPD	BKD	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 dokumen	89.827.150	Penetapan WPD	BKD	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 dokumen	89.827.150	

	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BKD	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2 layanan	247.540.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BKD	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 layanan	247.540.000	
	Penagihan Pajak Daerah	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 dokumen	31.741.250	Penagihan Pajak Daerah	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 dokumen	31.741.250	
	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 dokumen	96.105.800	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 dokumen	96.105.800	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BKD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 laporan	91.888.200	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BKD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 laporan	91.888.200	

	Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	BKD	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 laporan	154.954.200	Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	BKD	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 laporan	154.954.200	
					19.709.378.426					19.709.378.426	

Badan Keuangan Daerah merupakan OPD teknis yang menangani pengelolaan keuangan daerah dan secara kewenangan tidak terkait secara langsung dengan usulan kegiatan dari masyarakat. Terkait dengan usulan alokasi untuk hibah dan bansos yang berupa uang penganggarannya tidak lagi pada BKD. Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenkuler Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka dana tersebut langsung dialokasikan anggarannya dalam belanja kegiatan OPD terkait berdasar rekomendasi di OPD tersebut sesuai dengan kewenangannya.

Berikut kami sajikan Tabel 2.4 dan Tabel 2.5 yang menggambarkan NIHL untuk usulan program dan kegiatan langsung dengan masyarakat.

TABEL 2.7
PERSANDINGAN DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS HASIL MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2025
DENGAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

NO	Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2025				Kegiatan sesuai Renja Perangkat Daerah Tahun 2026		
	Kegiatan Prioritas	Lokasi (Kelurahan)	Indikator Kinerja	Volume	Kegiatan Rancangan Renja Tahun 2026	Pagu Indikatif Tahun 2026	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
	N I H I L						

TABEL 2.8
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026
KOTA PAYAKUMBUH

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1					
2		N I H I L			
3					
4					
5					

BAB III**TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH****3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Berdasarkan telaahan terhadap kebijakan nasional dan Provinsi Sumatera Barat maka dapat disampaikan faktor penghambat dan faktor pendorong dari pelayanan BKD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BKD ditinjau dari sasaran jangka menengah renstra K/L ataupun Renstra BKD Provinsi Sumatera Barat.

1. Faktor Penghambat

- a. Kedisiplinan ASN dalam membaca dan menyikapi seringnya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengalami perubahan sehingga menimbulkan kebingungan dipemerintah daerah khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.
- b. Masih banyak alokasi dana dari pemerintah pusat maupun propinsi yang diberikan kepada pemerintah daerah telah diperuntukan penggunaannya, sehingga pemerintah daerah yang masih mengandalkan dana perimbangan menjadi terbatas untuk mengalokasikan program dan kegiatan sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah
- c. Masih ada dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan dari kementerian terkait mewajibkan adanya dana sharing atau pendamping dari pemerintah daerah.

2. Faktor Pendorong

- a. Adanya komitmen yang sama dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi dalam peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah.
- b. Adanya reward dan punish terhadap pengelolaan keuangan daerah yang berkinerja baik dan buruk, contoh : Pemerintah Pusat memberikan Dana insentif Daerah bagi Pemerintah Daerah yang mendapatkan opini WTP dan Penetapan APBD tepat waktu serta kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah relatif baik dan

melakukan penundaan pengalokasian Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus apabila Pemerintah Daerah terlambat dalam penetapan APBD dan lambat dalam penyerapan APBD. Adanya forum komunikasi pengelola keuangan daerah di Propinsi, sehingga bisa dijadikan sebagai media dalam berkomunikasi terhadap permasalahan keuangan di Propinsi Sumatera Barat.

- c. Adanya Komunikasi Manajemen Data Nasional Sistem Informasi Keuangan Daerah (KOMANDAN SIKD) sehingga mempermudah Pemerintah Daerah menyampaikan data atau laporan keuangan ke Kementerian Keuangan.
- d. Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah sehingga memerlukan upaya untuk intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah. Disamping itu, diperlukan untuk menghitung berapa besar potensi penerimaan PAD yang sebenarnya, sehingga penetapan target penerimaan PAD didasarkan pada potensi yang ada tersebut.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Berdasarkan definisi di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh :

“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG TERTIB, EFEKTIF, EFISIEN, AKUNTABEL DAN TRANSPARAN YANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI”

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam periode Renstra BKD Tahun 2025-2029. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Berdasarkan definisi di atas, maka sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan Daerah adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah
3. Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintahan

Tujuan dan sasaran berikut indikator kinerja dan target Badan Keuangan Daerah dapat dijelaskan sebagaimana pada tabel 3.1 berikut:

TABEL 3.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan Sasaran
Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2026

NSPK dan SASARAN RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2024	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Periode RENSTRA					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tertib, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan yang Berbasis Teknologi Informasi	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1.1.Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	40,76%	46,55%	35%	30%	30%	30%	30%
			1.2.Persentase penurunan SILPA	11,49%	11%	10%	10%	9%	9%	9%
			1.3.Persentase laporan keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	2.1.Persentase penambahan nilai aset tetap	0,30%	2%	3%	4%	5%	5%	5%
		3. Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	3.1.Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	18,19%	19%	20%	21%	22%	23%	23%
			3.2.Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	4.1.Nilai AKIP oleh Inspektorat	71,90	77,71	77,00	80,00	80,00	80,00	80,00

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka rancangan Renja BKD Tahun 2026 disusun sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD
- B. Administrasi Keuangan PD
- C. Administrasi Kepegawaian PD
- D. Administrasi Umum PD
- E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- G. Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
- H. Peningkatan Pelayanan BLUD (UPTD Fasilitasi pembiayaan)

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

- A. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
- B. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- C. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- D. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- E. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi
Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

3. Program Pengelolaan BMD

- A. Pengelolaan Barang Milik Daerah

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

- A. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Rumusan program dan kegiatan tahun anggaran 2026 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan yang mana dimulai sejak tahun anggaran 2021. Uraian Renja OPD Badan Keuangan Daerah terdiri dari 4 Program, 14 Kegiatan dan 63 Sub Kegiatan yang ada dimasing masing kegiatan tersebut. Hal ini juga sudah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil

Verifikasi, validasi dan inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sementara itu sesuai amanat yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pos belanja gaji dan tunjangan yang tidak lagi menjadi bagian dari belanja tidak langsung, maka sejak perencanaan tahun 2022 begitupun tahun 2026 telah menjadi bagian belanja operasional perangkat daerah yang masuk kedalam Renja Badan Keuangan Daerah. Keadaan ini tergambar ke dalam tabel 3.2 sebagai berikut :

TABEL 3.2.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
KOTA PAYAKUMBUH

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana *)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-Nilai AKIP oleh Inspektorat - Nilai IKM	BKD	A; 88	12.681.045.963			A; 88	12.681.045.963
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan	BKD	100%	43.838.500			100%	43.838.500
	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	jumlah dokumen perencanaan PD	BKD	2 dokumen	22.834.900	DAU		2 dokumen	22.834.900
	Evaluasi Kinerja PD	jumlah laporan evaluasi kinerja PD	BKD	4 laporan	21.003.600	DAU		4 laporan	21.003.600
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan PD terhadap aliran kas	BKD	95%	9.708.044.573			95%	9.708.044.573
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BKD	62 orang/bulan	9.294.623.973	DAU		62 orang/bulan	9.294.623.973
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	BKD	1 dokumen	386.141.300			1 dokumen	386.141.300

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	BKD	4 laporan	27.279.300	DAU		4 laporan	27.279.300
3	Administrasi Kepegawaian PD	Persentase ASN yang berkapasitas	BKD	100%	265.000.000			100%	265.000.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	BKD	65 paket	65.000.000	DAU		65 paket	65.000.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	BKD	-	-	DAU		1 dokumen	-
	Sosialisasi Peraturan PerUndang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	BKD	100 orang	100.000.000	DAU		80 orang	100.000.000
	Bimtek Implementasi Peraturan PerUndang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	BKD	100 orang	100.000.000	DAU		80 orang	100.000.000
4	Administrasi Umum PD	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	BKD	80%	652.809.500			80%	652.809.500
	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	BKD	8 paket	3.630.000	DAU		8 paket	3.630.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	BKD	-	-	DAU		2 paket	-

	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	BKD	41 paket	42.967.600	DAU		41 paket	42.967.600
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	BKD	2 Paket	28.773.000	DAU		2 Paket	28.773.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	BKD	1 dokumen	1.499.400	DAU		1 dokumen	1.499.400
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	BKD	12 laporan	53.119.500	DAU		12 laporan	53.119.500
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BKD	30 laporan	522.820.000	DAU		30 laporan	522.820.000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang terpenuhi	BKD	80%	150.000.000			80%	150.000.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	BKD	4 unit/paket	75.000.000	DAU		4 unit/paket	75.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	BKD	4 unit	75.000.000	DAU		4 unit	75.000.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan perkantoran yang terfasilitasi dengan baik	BKD	80%	259.293.390			80%	259.293.390

	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKD	3 Laporan	6.095.000	DAU		3 Laporan	6.095.000
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BKD	4 Laporan	253.198.390	DAU		4 Laporan	253.198.390
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset yang terpelihara	BKD	100%	502.060.000			100%	502.060.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BKD	1 unit	42.950.000	DAU		1 unit	42.950.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BKD	35 Unit	439.110.000	DAU		35 Unit	439.110.000
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BKD	5 Unit	20.000.000	DAU		5 Unit	20.000.000

8	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase fasilitasi pembiayaan yang lancar dari total pembiayaan	BKD	75%	1.100.000.000			100%	1.100.000.000
	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	UPTD	1 Unit Kerja	1.100.000.000	DAU		1 Unit Kerja	1.100.000.000
II	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	-Persentase realisasi belanja thd anggaran; -Lap Keu berbasis akrual -Perda APBD tepat waktu	BKD	-95%; -ADA; -27 Des	4.088.250.813			-95%; -ADA; -27 Des	4.088.250.813
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen penganggaran yang dihasilkan	BKD	100%	1.616.157.800			100%	1.616.157.800
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	BKD	2 dokumen	28.371.150	DAU		2 dokumen	28.371.150
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	BKD	2 dokumen	29.074.700	DAU		2 dokumen	29.074.700
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	BKD	1 dokumen	21.856.300	DAU		1 dokumen	21.856.300
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang Diverifikasi	BKD	1 dokumen	22.240.150			1 dokumen	22.240.150
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	BKD	31 dokumen	3.583.350	DAU		31 dokumen	3.583.350

	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	BKD	31 dokumen	5.536.950			31 dokumen	5.536.950
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	BKD	2 dokumen	1.398.034.550	DAU		2 dokumen	1.398.034.550
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	BKD	2 dokumen	80.536.300	DAU		2 dokumen	80.536.300
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BKD	3 dokumen	26.924.350	DAU		3 dokumen	26.924.350
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase meningkatnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	BKD	100%	1.136.953.525			100%	1.136.953.525
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BKD	3 dokumen	6.525.200	DAU		3 dokumen	6.525.200
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BKD	124 dokumen	118.148.250	DAU		124 dokumen	118.148.250

	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BKD	60 dokumen	110.057.475	DAU		60 dokumen	110.057.475
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan PFK	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BKD	750 Laporan	38.555.000	DAU		750 Laporan	38.555.000
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	BKD	384 dokumen	54.342.550	DAU		384 dokumen	54.342.550

	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BKD	2 dokumen	11.526.900	DAU		2 dokumen	11.526.900
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BKD	80 orang	797.798.150	DAU		80 orang	797.798.150
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya kualitas laporan keuangan PD	BKD	100%	1.097.702.095			100%	1.097.702.095
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BKD	4 laporan	5.307.016	DAU		4 laporan	5.307.016
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan - LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	BKD	87 dokumen	390.203.750	DAU		87 dokumen	390.203.750

	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BKD	21 laporan	55.240.866	DAU		21 laporan	55.240.866
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	BKD	37 laporan	316.874.250	DAU		37 laporan	316.874.250
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BKD	2 dokumen	72.279.715	DAU		2 dokumen	72.279.715
	Penyusunan Tanggapan / Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tinjau	BKD	-	-	-		-	-
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BKD	2 dokumen	31.396.054	DAU		2 dokumen	31.396.054

	Penyusunan Analisa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BKD	1 dokumen	9.405.897	DAU		1 dokumen	9.405.897
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BKD	1 dokumen	8.702.397	DAU		1 dokumen	8.702.397
	Pembinaan akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BKD	72 Orang	208.292.150	DAU		75 Orang	208.292.150
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan urusan kewenangan daerah dan bantuan yang tersalurkan	BKD	70%	43.170.085			70%	43.170.085
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BKD	-	-	DAU		-	-
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BKD	1 laporan	43.170.085	DAU		1 laporan	43.170.085

5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan dan implementasi sistem terhadap data keuangan daerah	BKD	100%	194.267.308			100%	194.267.308
	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	BKD	45 dokumen	11.826.254	DAU		45 dokumen	11.826.254
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	BKD	4 Dokumen	82.874.800	DAU		1 Dokumen	82.874.800
	Pembinaan Sistem informasi Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BKD	32 orang	99.566.254	DAU		32 orang	99.566.254
III	PROGRAM PENGELOLAAN BMD	Persentase PD yang menyediakan laporan aset sesuai dengan peraturan pengelolaan BMD	BKD	90,32%	1.547.624.650			90,32%	1.547.624.650
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD dan Aset Kota yang terkelola dengan baik	BKD	100%	1.547.624.650			100%	1.547.624.650
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	BKD	1 dokumen	58.444.150	DAU		1 dokumen	58.444.150

	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	BKD	2 dokumen	41.740.500	DAU		1 dokumen	41.740.500
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	BKD	31 laporan	320.871.000	DAU		31 laporan	320.871.000
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang melakukan inventarisasi BMD	BKD	31 laporan	300.000.000	-		31 OPD	300.000.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang di asuransikan	BKD	-	-	-		12 bulan	-
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	BKD	1 laporan	44.997.300	DAU		31 laporan	44.997.300
	Optimalisasi Penggunaan , Pemanfaatan , Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BKD	31 dokumen	693.891.200	DAU		31 dokumen	693.891.200
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BKD	31 laporan	78.457.500	DAU		31 laporan	78.457.500

	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	BKD	31 laporan	9.223.000	DAU		31 laporan	9.223.000
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BKD	-	-	-		31 orang	-
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi PAD	BKD	100%	1.392.457.000			100%	1.392.457.000
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah	BKD	5%	1.392.457.000			5%	1.392.457.000
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	BKD	-	-	DAU		-	-
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BKD	12 laporan	156.278.250	DAU		12 laporan	156.278.250
	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BKD	25 Unit	311.070.050	DAU		10 Unit	311.070.050

	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	BKD	12 laporan	141.516.000	DAU		12 laporan	141.516.000
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BKD	1 laporan	36.566.350	DAU		1 laporan	36.566.350
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBBP2) serta Besa Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	BKD	2 Objek Pajak	34.969.750	DAU		2 Objek Pajak	34.969.750
	Penetapan WPD	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	BKD	12 dokumen	89.827.150	DAU		12 dokumen	89.827.150
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BKD	2 layanan	247.540.000	DAU		1 layanan	247.540.000
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	BKD	1 dokumen	31.741.250	DAU		1 dokumen	31.741.250
	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	BKD	12 dokumen	96.105.800	DAU		12 dokumen	96.105.800
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BKD	1 laporan	91.888.200	DAU		1 laporan	91.888.200

	Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	BKD	12 laporan	154.954.200	DAU		12 laporan	154.954.200
	TOTAL				19.709.378.426				19.709.378.426

BAB IV**RENCANA KERJA dan PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran rencana kerja tahun pertama dari masa Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Rumusan rencana kerja program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Rencana kerja program dan kegiatan yang disajikan berikut sesuai dengan nomenklatur dan kodefikasi program kegiatan dari hasil pemetaan yang diamanatkan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 dan dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Indikator dan target sasaran juga telah mengacu pada indikator dan target sasaran /program yang terdapat pada Renstra BKD Tahun 2025-2029 dan RKPD yang berlaku. Rencana program dan kegiatan telah disesuaikan dengan pagu indikatif tahun 2026 yang terdiri dari 4 program, 14 kegiatan dan 63 sub kegiatan.

Rencana kerja program dan kegiatan serta pagu indikatif Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Payakumbuh Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

TABEL 4.1
RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEUANGAN DAERAH						16.827.219.274,00							18.035.728.690,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						16.827.219.274,00							18.035.728.690,00	
	5.02	KEUANGAN						16.827.219.274,00							18.035.728.690,00	
1,	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai IKM	-			85.00 Indeks	11.687.171.344,00						-	11.382.546.563,00	
		[Meningkatkan kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah]	Nilai IKM	89.00	84.25	85.00	85.00	11.687.171.344,00	-	-	-	-	-	-	11.382.546.563,00	-
	5.02.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	-			100 %	52.738.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD dan Stakeholder	-	45.838.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

	5.02.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	29.195.350,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD dan Stakeholder		22.834.900,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	21.542.150,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta	OPD dan Stakeholder		21.003.600,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

											korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas					
	5.02.01.2.0 1.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah															
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1.000.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta	OPD dan Stakeholder		1.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	

											berkualitas					
	5.02.01.2.0 1.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1.000.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD dan Stakeholder		1.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	-			100 %	10.093.490.704,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD dan Stakeholder	-	9.708.044.573,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

	5.02.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/bulan	9.515.950.754,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH - LRA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD dan Stakeholder		9.294.623.973,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	550.097.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta	OPD dan Stakeholder		386.141.300,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

											berkualitas					
	5.02.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	27.442.950,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD dan Stakeholder		27.279.300,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

	5.02.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 %	65.669.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD dan Stakeholder	-	.000,00	65.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				65 Paket	65.669.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD dan Stakeholder		.000,00	65.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks layanan administrasi perangkat daerah	-			75 %	650.150.440,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD dan Stakeholder	-	652.310.100,00		BADAN KEUANGAN DAERAH

	5.02.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	3.565.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD dan Stakeholder		3.630.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				41 Paket	42.620.240,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD dan Stakeholder		42.967.600,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	28.031.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD dan Stakeholder		.000,00	28.773	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	59.383.200,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD dan Stakeholder		53.119.500,00		BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	515.549.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD dan Stakeholder		522.820.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1.000.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD dan Stakeholder		1.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD	-			80 %	133.062.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD dan Stakeholder	-	150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

	5.02.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	18.099.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	OPD dan Stakeholder		.000,00	75.000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	114.963.200,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi,	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	OPD dan Stakeholder		.000,00	75.000	BADAN KEUANGAN DAERAH	

										narkoba, judi, dan penyeludupan	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas				
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	-			80 %	306.740.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD dan Stakeholder	-	259.293.390,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3.220.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD dan Stakeholder	6.095.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

	5.02.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	303.520.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD dan Stakeholder		253.198.390,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	-			80 %	385.320.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD dan Stakeholder	-	502.060.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	39.190.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD dan Stakeholder		42.950.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	312.250.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD dan Stakeholder		439.110.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	33.880.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD dan Stakeholder		20.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
2,	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penurunan SILPA Persentase Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah diluar Tunjangan Guru Opini BPK atas Laporan Keuangan	-			11 % 51.54 % WTP Nilai	3.097.918.280,00						-	3.722.323.477,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	persentase dokumen penganggaran yang dihasilkan	-			100 %	1.612.484.915,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder	-	1.616.157.800,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														

			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	28.371.015,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		28.371.150,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	28.882.150,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		29.074.700,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 1.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														

			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	19.460.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		.300,00	21.856	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 1.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD															
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	21.471.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder			22.240.150,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 1.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD															

			Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	3.144.300,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		3.583.350,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 1.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	5.981.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		5.536.950,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 1.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														

			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	1.398.034.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		1.398.034.550,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 1.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	80.536.050,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		80.536.300,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

	5.02.02.2.0 1.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				3 Dokumen	26.604.400,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		.350,00	26.924	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.02.2.0 2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase meningkatnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	-			100 %	479.435.150,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder	-	485.353.525,00		BADAN KEUANGAN DAERAH	

	5.02.02.2.0 2.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				3 Dokumen	6.519.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		6.525.200,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 2.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				124 Dokumen	118.142.900,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		118.148.250,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 2.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				60 Dokumen	110.036.600,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		110.057.475,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)														
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)				750 Laporan	36.388.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		38.555.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 2.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														

			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				384 Dokumen	51.546.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		.550,00	54.342	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 2.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan															
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				2 Dokumen	10.607.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		11.526.900,00		BADAN KEUANGAN DAERAH

	5.02.02.2.0 2.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				80 Orang	146.194.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		146.198.150,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya kualitas laporan keuangan PD	-			100 %	469.243.950,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder	-	1.092.395.079,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

	5.02.02.2.0 3.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				87 Dokumen	19.403.650,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		390.203.750,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 3.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				21 Laporan	54.681.950,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		55.240.866,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 3.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														

			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi					2 Laporan	45.673.900,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		316.874.250,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					2 Dokumen	65.088.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		.715,00	72.279	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				2 Dokumen	7.035.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		.054,00	31.396	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.02.2.0 3.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	950,00	7.074.	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		897,00	9.405.	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 3.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																

			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	800,00	7.910.	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		397,00	8.702.	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				154 Orang	262.374.900,00		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		208.292.150,00		BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan urusan kewenangan daerah dan bantuan yang tersalurkan	-			70 %	290.409.265,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder	-	334.149.765,00		BADAN KEUANGAN DAERAH

	5.02.02.2.0 4.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	290.409.265,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		334.149.765,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan dan implementasi sistem terhadap data keuangan daerah	-			100 %	246.345.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder	-	194.267.308,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 5.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah														

			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				45 Dokumen	10.070.300,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		.254,00	11.826	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 5.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah															
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				4 Dokumen	102.852.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		.800,00	82.874	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 5.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota															

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				32 Orang	133.421.900,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		99.566.254,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
3,	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	-			5.00 %	915.159.650,00						-	1.538.401.650,00	
		[Meningkatnya tata kelola aset daerah]	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	7.00	0	5.00	5.00	915.159.650,00	-	-	-	-	-	-	1.538.401.650,00	-
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD dan Aset Kota yang dikelola dengan baik	-			100 %	915.159.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder	-	1.538.401.650,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														

			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	62.785.450,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		.150,00	58.444	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.0 1.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah															
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	41.268.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		.500,00	41.740	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.0 1.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah															

			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				31 Laporan	318.822.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		320.871.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.0 1.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				31 Laporan	341.660.300,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.0 1.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														

			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				31 Dokumen	62.861.050,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		44.997.300,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.0 1.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				31 Laporan	77.849.550,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		693.891.200,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.0 1.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														

			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				31 Laporan	9.912.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		78.457.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
4,	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	-			100 % 19 %	1.126.970.000,00						-	1.392.457.000,00	
		[Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah, Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital]	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	100.00 23.00	100.00 18.19	100.00 12.00 19.00	100.00 19.00	1.126.970.000,00	-	-	-	-	-	-	1.392.457.000,00	-
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah Nilai IKM	-			5 %87 Nilai	1.126.970.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder	-	1.392.457.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

	5.02.04.2.0 1.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	72.894.150,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		156.278.250,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				25 Unit	162.267.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		311.070.050,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														

			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	133.066.650,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		141.516.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	36.717.450,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		36.566.350,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														

			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				2 Obyek Pajak	72.679.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder	.750,00	34.969	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				12 Dokumen	71.740.950,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder	.150,00	89.827	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														

			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				2 Layanan	160.028.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		247.540.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	33.295.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		31.741.250,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0013	Pengendalian, Pemerkasaan dan Pengawasan Pajak Daerah														

			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	124.666.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		.800,00	96.105	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	94.050.200,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		.200,00	91.888	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah															

			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				12 Laporan	165.562.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		154.954.200,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
		UPTD FASILITASI PEMBIAYAAN						1.100.000.000,00							1.100.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.100.000.000,00							1.100.000.000,00	
	5.02	KEUANGAN						1.100.000.000,00							1.100.000.000,00	
1,	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	-			85.00 Indeks	1.100.000.000,00						-	1.100.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	1.100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.100.000.000,00	-
	5.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase fasilitasi pembiayaan yang lancar dari total pembiayaan	-			100 persen	1.100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD dan Stakeholder	-	1.100.000.000,00	UPTD FASILITASI PEMBIAYAAN
	5.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.100.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD dan Stakeholder		1.100.000.000,00	UPTD FASILITASI PEMBIAYAAN
			J U M L A H					17.927.219.274,00							19.135.728.690,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahun pertama dari penjabaran Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah (Renstra BKD) Tahun 2025 – 2029. Renja tahun 2026 menunjukkan tujuan dan sasaran serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat.

Dengan tersusunnya rencana kerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan program kegiatan di Badan Keuangan Daerah sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna. Kemudian semua pihak diharapkan memiliki satu persepsi tentang rencana kerja sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal.

Adanya rencana kerja ini diharapkan Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh serta seluruh aparaturnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi kepada instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Payakumbuh, September 2025

Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH



Drs. BASNIDA EFRIZAL, M. Si
NIP. 19710412 199101 1 001



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Veteran No. 70 Komplek Balaikota Lantai 3 Ex. Lapangan Poliko
Kel. Kapalo Koto Dibalai Payakumbuh Telp. (0752)92052

MATRIK LEMBARAN KERJA

GENDER ANALYSIS PATHWAY DAN POLICY OUTLOOK FOR PLAN OF ACTION (GAP)

SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2026

OPD : BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

NO	LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
	Kebijakan / program	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
			Faktor Kesenjangan	Sebab Internal	Sebab Eksternal	Reformasi Tujuan	Rencana Aksi Perioritas/ Kegiatan /Indikator	Baseline Data	Indikator Kinerja
1.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah OPD di Kota Payakumbuh sebanyak 31 OPD, dimana akan terus dilakukan pembinaan kepada pelaksana keuangan dan penatusahaan serta pembuatan laporan pertanggungja waban terkait adanya perubahan peraturan pengelolaan keuangan	1.Akses : Study kelayakan pemantauan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum ada kepastian dalam penggaran terhadap responsif gender dari pemerintah daerah Kota Payakumbuh. 2. Partisipasi : Rumusan kegiatan penyusunan APBD dan APBD Kota Payakumbuh belum didasari dengan analisis gender. 3.Kontrol : Study aspek sosial (identifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat termasuk isu gender) masih belum jadi perhatian dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. 4. Manfaat : Belum terlaksananya pengelolaan keuangan yang baik dengan prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel.	1.Sebagian besar Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Keuangan Daerah belum mengetahui perspektif gender sebab isu gender belum dianggap penting dan ditanggapi dengan serius.	Belum terbangunnya hubungan responsif gender antara SKPD, dimana SKPD belum mampu merekomendasikan sesuai dengan aturan penyusunan APBD Kota Payakumbuh .	1.Terakomodirnya kegiatan yang responsif Gender pada Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah agar rancangan Perda dapat ditetapkan dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel.	1.Pemerintah daerah dapat merencanakan penganggaran untuk responsif Gender dengan memberi kode/tagging pada indikator kegiatan.	Rumusan Kinerja Output : Menyusun Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Indikator kinerja Output : Tercapainya penetapan APBD tepat waktu	Rumusan Kinerja Output : 1. Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh akan menghimpun semua kegiatan yang telah berkode gender. 2. Kegiatan yang telah dihimpun akan diakomodir dalam penjabaran APBD berupa rancangan Peraturan Walikota Payakumbuh. Indikator kinerja Output : 1. OPD menyusun kegiatan yang dianggap sudah mengakomodir responsif gender dengan mencantumkan pada kegiatan dengan memberi kode gender yang telah diusulkan dalam KUA dan PPAS. 2. Rancangan Peraturan Walikota Payakumbuh akan dibahas dengan bersama dengan Badan Anggaran Legislatif (DPRD Kota Payakumbuh). 3. Setelah melalui proses evaluasi oleh Propinsi Sumatera Barat maka ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Penjabaran APBD Kota Payakumbuh.
		Tidak adanya pemisahan sumber dana yang dapat meningkatkan kemajuan organisasi perempuan.	2.Rumusan kegiatan penyusunan APBD Kota Payakumbuh belum didasari dengan analisis gender.	2.Belum terbangunnya hubungan responsif gender antara SKPD, dimana SKPD belum mampu merekomen dasikan dengan aturan penyusunan APBD Kota Payakumbuh		2.Menyusun Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.	2.Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh akan menghimpun semua kegiatan yang telah berkode gender.		

		Tidak adanya jumlah kegiatan yang dibedakan antara perempuan dengan laki-laki.	3.Study aspek sosial (identifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat termasuk isu gender) masih belum jadi perhatian dalam penyusunan APBD Kota Payakumbuh.				3.Kegiatan yang telah dihimpun akan diakomodir dalam penjabaran APBD berupa rancangan Peraturan Walikota Payakumbuh .		
							4.Rancangan Peraturan Walikota Payakumbuh akan dibahas dengan bersama dengan Badan Anggaran Legislatif (DPRD Kota Payakumbuh).		
							5.Setelah melalui proses evaluasi oleh Propinsi Sumatera Barat maka ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2025 dan APBD TA 2026.		
							6.Penjabaran Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2025 dan APBD TA 2026 di rinci untuk masing-masing kegiatan OPD dengan menyusun DPPA SKPD Tahun 2025 dan DPA Tahun 2026		

Payakumbuh, Maret 2025
KEPALA EKD KOTA PAYAKUMBUH



Drs. SYAFWAL, MM
NIP. 19690116 199009 1 001



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Veteran No. 70 Komplek Balaikota Lantai 3 Ex. Lapangan Poliko
Kel. Kapalo Koto Dibalai Payakumbuh Telp. (0752)92052

MATRIK LEMBARAN KERJA

GENDER ANALYSIS PATHWAY DAN POLICY OUTLOOK FOR PLAN OF ACTION (GAP)

SUB KEGIATAN : KOORDINASI & PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERKADA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KAB/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2026

OPD : BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

	LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
NO	Kebijakan / program	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
			Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Baseline Data	Indikator Kinerja
1.	Program : Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah OPD di Kota Payakumbuh sebanyak 31 OPD, dimana akan terus dilakukan pembinaan kepada pelaksana keuangan dan penatusahaan serta pembuat laporan pertanggung jawaban terkait adanya perubahan peraturan pengelolaan keuangan	1.Akses : Pemahaman pelaksana pembuat laporan keuangan SKPD yang belum merata sehingga perlu dilakukan pembinaan agar meratanya informasi peraturan terkait pengelolaan keuangan;	1.Sebagian besar Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Keuangan Daerah belum mengetahui perspektif gender sebab isu gender belum dianggap penting dan ditanggapi dengan serius;	1.Belum terbangunnya hubungan responsif gender antara SKPD, dimana SKPD belum mampu merekomendasikan sesuai dengan aturan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh;	Pemerintah daerah dapat merencanakan penganggaran untuk responsif Gender dengan memberi kode/tagging pada indikator kegiatan.	1. Melaksanak an pembinaan berupa bimbingan teknis maupun sosialisasi tentang peraturan pengelolaan keuangan terhadap pelaksana yang responsif gender	Input : 1. Guiden atau tutorial dari pemerintah pusat 2. Narasumber atau mentor 3. Peserta pembuat laporan keuangan	Rumusan Kinerja : Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh akan menghimpun setiap penggunaan anggaran pembangunan yang menjadi kewenangan SKPD sebagai pengguna anggaran dalam bentuk laporan pertanggungjawaban Indikator Kinerja : 1. OPD menyusun kegiatan yang dianggap sudah mengakomodir responsif gender dan dicantumkan pada kegiatan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD. 2. Rancangan Peraturan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD akan dibahas dengan bersama dengan Badan Anggaran Legislatif (DPRD Kota Payakumbuh). 3. Setelah melalui proses evaluasi oleh Propinsi Sumatera Barat maka ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Payakumbuh.

			2.Partisipasi : Seluruh OPD mengikuti pembinaan yang dilaksanakan;	2.Tenaga yang memberikan pembinaan didominasi oleh perempuan.	2.OPD mengirimkan SDM yang tersedia dan mau melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan tanpa memperhatikan atau responsif gender.	2.Menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.	2.Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh akan menghimpun semua kegiatan yang telah berkode gender.	Output : 1. Terlaksananya pembinaan 2. Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 3. Tersedianya Rancangan Perda dan Rancangan Perwako tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
			3.Kontrol : Keterbatasan kapasitas SDM dengan latar belakang gender dan kondisi peraturan yang berubah ubah dalam kurun waktu berdekatan;				3.Kegiatan yang telah dihimpun akan masuk ke dalam penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berupa rancangan Peraturan Walikota Payakumbuh		
			4.Manfaat : Terlaksananya pengelolaan keuangan yang baik dengan prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel.						

Payakumbuh, Maret 2025
KEPALA PKD KOTA PAYAKUMBUH



Drs. SYAFWAL, MM
NIP. 19690116 199009 1 001



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Veteran No. 70 Komplek Balaikota Lantai 3 Ex. Lapangan Poliko
Kel. Kapalo Koto Dibalai Payakumbuh Telp. (0752)92052

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT) TAHUN 2026

SKPD	:	BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:	Pengelolaan Keuangan Daerah
KEGIATAN	:	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
SUB KEGIATAN	:	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
KODE KEGIATAN	:	5. 02. 02. 2.01. 07
ANALISIS SITUASI	:	1. Data Pembuka Wawasan (data terpilah Gender) : a. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kota Payakumbuh sebanyak 31 OPD. b. Tidak adanya pemisahan sumber dana yang dapat meningkatkan kemajuan organisasi perempuan. c. Tidak adanya jumlah kegiatan yang dibedakan antara perempuan dengan laki-laki.
	:	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender : a. Akses : 1. Study kelayakan pemantauan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum ada kepastian dalam penganggaran terhadap responsif gender dari pemerintah daerah Kota Payakumbuh. 2. Rumusan kegiatan penyusunan APBD Kota Payakumbuh belum didasari dengan analisis gender. 3. Study aspek sosial (identifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat termasuk isu gender) masih belum jadi perhatian dalam penyusunan APBD Kota Payakumbuh. b. Penyebab Internal : 1. Sebagian besar Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Keuangan Daerah belum mengetahui perspektif gender sebab isu gender belum dianggap penting dan ditanggapi dengan serius. 2. Belum terbangunnya hubungan responsif gender antara OPD, dimana OPD belum mampu

			merekomendasikan sesuai dengan aturan penyusunan APBD Kota Payakumbuh. c. Penyebab Eksternal : Kuranginya komunikasi antar Organisasi Perangkat Daerah mengenai responsif gender.
RENCANA TINDAK		Kegiatan :	
		Tujuan	Terakomodirnya kegiatan yang responsif Gender pada Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah agar rancangan Perda dapat ditetapkan dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
		Aktivitas	1. Menghimpun data sesuai dengan KUA dan PPAS. 2. Verifikasi RKA SKPD. 3. Rapat kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan DPRD (Banggar) .
		Sumber Daya (inputs)	Dana : sebesar Rp. 1.398.034.550,- SDM : TAPD dengan anggota sebanyak 45 orang. Peralatan : computer, laptop, printer
		Output	Rumusan Kinerja : Menyusun Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Indikator kinerja : Tercapainya penetapan APBD tepat waktu
ALOKASI SUMBER DAYA	:	Jumlah Anggaran Kegiatan :	Belanja untuk Menyusun Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun 2026 sebesar Rp. 1.398.034.550,-
		SDM	TAPD dengan anggota sebanyak 45 orang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Bappeda, BKD.
		Peralatan dan mesin	Komputer, laptop, printer

OUTCOMES		Rumusan Kinerja: 1. Pemerintah daerah dapat merencanakan penganggaran untuk responsif Gender dengan memberi kode/tagging pada indikator kegiatan. 2. Menyusun Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat Indikator kinerja : (1)OPD menyusun kegiatan yang dianggap sudah mengakomodir responsif gender dengan mencantumkan pada kegiatan dengan memberi kode gender yang telah diusulkan dalam KUA dan PPAS. (2)Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh akan menghimpun semua kegiatan yang telah berkode gender. (3)Kegiatan yang telah dihimpun akan diakomodir dalam penjabaran APBD berupa rancangan Peraturan Walikota Payakumbuh. (4)Rancangan Peraturan Walikota Payakumbuh akan dibahas dengan bersama dengan Badan Anggaran Legislatif (DPRD Kota Payakumbuh). (5)Setelah melalui proses evaluasi oleh Propinsi Sumatera Barat maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD. (6)Penjabaran APBD Kota Payakumbuh di rinci untuk masing-masing kegiatan OPD dengan menyusun DPA SKPD.
------------------------	--	--

Payakumbuh, Maret 2025
KEPALA BKD KOTA PAYAKUMBUH



Drs. SYAFWAL, MM
NIP. 19690116 199009 1 001



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Veteran No. 70 Komplek Balaikota Lantai 3 Ex. Lapangan Poliko
Kel. Kapalo Koto Dibalai Payakumbuh Telp. (0752)92052

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT) TAHUN 2026

SKPD	:	BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:	Pengelolaan Keuangan Daerah
KEGIATAN	:	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
SUB KEGIATAN	:	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
KODE KEGIATAN	:	5. 02 .02. 2.03. 05
ANALISIS SITUASI	:	1. Data Pembuka Wawasan (data terpilah Gender) : a. Jumlah OPD di Kota Payakumbuh sebanyak 31 OPD, dimana akan terus dilakukan pembinaan kepada pelaksana keuangan dan penatusahaan serta pembuat laporan pertanggungjawaban terkait adanya perubahan peraturan pengelolaan keuangan
	:	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender : a. Akses : 1. Pemahaman pelaksana pembuat laporan keuangan OPD yang belum merata sehingga perlu dilakukan pembinaan agar meratanya informasi peraturan terkait pengelolaan keuangan. b. Penyebab Internal : 1. Sebagian besar Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Keuangan Daerah belum mengetahui perspektif gender sebab isu gender belum dianggap penting dan ditanggapi dengan serius. 2. Tenaga yang memberikan pembinaan didominasi oleh perempuan.

			c. Penyebab Eksternal : 1. Belum terbangunnya hubungan responsif gender antara OPD, dimana OPD belum mampu merekomendasikan sesuai dengan aturan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh. 2. OPD mengirimkan SDM yang tersedia dan mau melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan tanpa memperhatikan atau responsif gender.
RENCANA TINDAK			Kegiatan :
		Tujuan	Menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
		Aktivitas	1. Melaksanakan pembinaan berupa bimbingan teknis maupun sosialisasi tentang peraturan pengelolaan keuangan terhadap pelaksana yang responsif genderMelakukan verifikasi data. 2. Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh akan menghimpun semua kegiatan yang telah berkode gender 3. Kegiatan yang telah dihimpun akan masuk ke dalam penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa rancangan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota Payakumbuh.
		Sumber Daya (inputs)	Dana : sebesar Rp. 65.089.000,- SDM : Tim Pertanggungjawaban APBD Peralatan : computer, laptop, printer
		Output	Rumusan Kinerja : Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Indikator kinerja : Meningkatnya informasi manajemen pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja di lingkungan pemerintah Kota Payakumbuh

ALOKASI SUMBER DAYA	:		Jumlah Anggaran Kegiatan :	Belanja untuk kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 65.089.000,-
			SDM	dengan anggota yang mewakili Sekretariat Daerah, BKD, Inspektorat.
			Peralatan dan mesin	Komputer, laptop, printer
OUTCOMES			Rumusan Kinerja: Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat Indikator kinerja : (1)OPD menyusun kegiatan yang dianggap sudah mengakomodir responsif gender dan dicantumkan pada kegiatan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD. (2)Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD akan dibahas dengan bersama dengan Badan Anggaran Legislatif (DPRD Kota Payakumbuh). (3)Setelah melalui proses evaluasi oleh Propinsi Sumatera Barat maka ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Payakumbuh.	

Payakumbuh, Maret 2025
 KEPALA BKD KOTA PAYAKUMBUH



Drs. SYAFWAL, MM
NIP. 19690116 199009 1 001

POHON KINERJA BKD TAHUN 2025-2029

KOTA

MENINGKATNYA
BROKRASI YANG
BERSIH DAN
AKUNTABEL

OPINI BPK

ES II

1.MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

IK 1.1.Opini BPK atas LKPD;
IK 1.2.Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui IK 1.3.Persentase penurunan SILPA;

2.MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN ASET DAERAH

IK 2.1.Persentase penambahan nilai aset tetap;

3.MENINGKATNYA KAPASITAS FISKAL DAERAH

IK 3.1.Persentase PAD terhadap pendapatan daerah;
IK 3.2.Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital;

4.MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA

IK 4.1.Nilai AKIP oleh Inspektorat.

ES III

1. MENINGKATNYA TATA KELOLA AKUNTANSI DAN PELAPORAN

IK 1.LKPD tepat waktu.

2.MENINGKATNYA TATA KELOLA ANGGARAN

IK 1.Penda APBD tepat waktu.

3.MENINGKATNYA TATA KELOLA PERBENDAHARAAN

IK 1.Persentase penurunan SILPA;
IK 2.Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar.

4.MENINGKATNYA TATA KELOLA ASET DAERAH

IK 1.Persentase penambahan nilai aset tetap.

5. MENINGKATNYA TATA KELOLA PENDAPATAN DAERAH

IK 1.Ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan;
IK 2.Pembiayaan dan pengawasan pengelolaan IK 3.Penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital.

2.MENINGKATNYA NILAI AKIP BKD

IK 1.Tersedianya dokumen perencanaan kinerja;
IK 2.Tersedianya dokumen pengukuran kinerja;
IK 3.Tersedianya dokumen pelaporan kinerja;
IK 4.Monitoring dan evaluasi kinerja.

ES IV/ FUNGSIONAL PELAKSANA

1. Persentase LKPD yang sesuai dengan SAP;
2. Persentase LKPD yang memenuhi SPJP;
3. Persentase LKPD yang mematuhi peraturan PerUndang-Undangan;
4. Penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital dalam pelaporan akuntansi;
5. Tersedianya regulasi/kebijakan/ perda/perwaka yang dihasilkan.

1.1.Jumlah SKPD yang dibina ;
1.2.Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi.
2.1.Jumlah SKPD yang dibina ;
2.2.Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi;
2.3.Jumlah penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan kerugian daerah
3.1.Jumlah SKPD yang dibina ;
3.2.Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi.
2.1.Persentase kualitas sarana dan prasarana yang tersedia;
2.2.Jumlah laporan keuangan, pertanggungwbn pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan, semesteran.
5.1.Jumlah regulasi/kebijakan/ perda/perwaka yang dihasilkan.

1.Tersedianya regulasi/kebijakan terkait penganggaran;
2.Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru;
3.Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik;
4. Penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital dalam penganggaran.

1.1.Jumlah regulasi dan kebijakan/perda perwako APBD yang tersedia;
2.1.Jumlah verifikasi RKA dan DPA;
2.2.Jumlah verifikasi perubahan RKA dan perubahan DPA.
3.1.Jumlah verifikasi RKA dan DPA;
3.2.Jumlah verifikasi perubahan RKA dan perubahan DPA.
4.1.Persentase kualitas sarana dan prasarana yang tersedia;
4.2.Jumlah dokumen RKA/DPA SKPD.

1.Tersedianya regulasi/kebijakan terkait perbendaharaan;
2.Tersedianya dokumen KASDA;
3. Penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital dalam perbendaharaan.

1.1.Jumlah regulasi dan kebijakan/ Perwako/SPD/SE yang tersedia;
2.1.Jumlah dokumen/berita acara/rekonsiliasi data/laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas yang tersedia.
3.1.Jumlah dokumen penatausahaan belanja;
3.2.Persentase kualitas supra yang tersedia.

1.Tersedianya regulasi/kebijakan terkait aset daerah;
2.Tersedianya daftar aset tetap;
3.Tersedianya manual untuk menyusun daftar aset tetap;
4.Tersedianya proses inventarisasi aset tahunan;
5. Penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital dalam pengelolaan aset.

1.1.Jumlah regulasi dan kebijakan/ Perwako/SE yang tersedia;
2.1.Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi;
2.2.Jumlah SKPD yang dibina;
2.3.Jumlah daftar aset tetap SKPD.
3.1.Jumlah manual untuk menyusun daftar aset tetap.
4.1.Jumlah SKPD yang dibina;
4.2.Jumlah rekonsiliasi yang dilaksanakan;
4.3.Jumlah daftar inventarisasi
2.1.Persentase kualitas sarana dan prasarana yang tersedia.

1.Tersedianya regulasi/kebijakan terkait pengelolaan pendapatan daerah;
2.Penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital dalam pengelolaan pendapatan;
3. Kualitas layanan pajak daerah

1.1.Jumlah regulasi yang tersedia;
1.2.Intensitas penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan.
2.1.Persentase kualitas sarana dan prasarana yang tersedia;
2.2.Jumlah laporan elektrifikasi transaksi pendapatan.
3.1.Persentase kualitas sarana dan prasarana yang tersedia;
3.2.Persentase kualitas sdm yang tersedia;
3.3.Nilai

1.Kualitas layanan umum BKD

1.1.Persentase kualitas sarana prasarana yang tersedia;
1.2.Persentase kualitas sdm yang tersedia.
2.1.Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja;
2.2.Jumlah dokumen penatausahaan keuangan;
2.3.Jumlah dokumen evaluasi kinerja.